Harian
JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan
TERVERIFIKASI DEWAN PERS

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E.,MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

SENIN: EDISI 852 TAHUN XIX, 3 - 9 AGUSTUS 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Mobil Listrik Jadi Daya Tarik,

Ancol Points Hadirkan Pengalaman Loyalitas yang Berbeda

Jakarta, Jaya Pos

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui penyelenggaraan Undian Ancol Points yang digelar di panggung Ancol Sunset Sound, Jakarta, pada 27 Juli 2026. Ribuan pengunjung memadati lokasi untuk menyaksikan secara langsung proses pengundian berbagai hadiah menarik yang ber-

▸▸ Halaman 5

Ancol Points 2026 Sukses Digelar. (Foto : Dok)

KPSP Setia Kawan Pasuruan Produksi 110 Ton Susu Segar per Hari

Pasuruan, Jaya Pos

Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, terus menjadi salah satu pemasok utama susu segar bagi industri pengolahan susu (IPS) nasional. Hampir 70 tahun berdiri, koperasi ini memasok susu ke sejumlah perusahaan besar, namun kapasitas produksi saat ini masih belum mampu memenuhi seluruh permintaan pasar.

▸▸ Halaman 5

Rutinitas truk muatan pengangkut Susu segar di KPSP Setia Kawan Nongko Jajar (Foto : Istimewa)

TUKIN TNI NAIK, PRABOWO TERBITKAN PERPRES BARU

Anggota TNI. (Foto: IST)

> Kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan meningkat. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan aturan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 90 persen, menggantikan ketentuan yang berlaku sejak 2018.

Jakarta, Jaya Pos

Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kenaikan indeks tukin dari 70 persen menjadi 90 persen itu diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026, dengan pembayaran ditargetkan mulai September 2026.

Kenaikan tukin tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Kedua aturan itu

▸▸ Halaman 5

Pemkab Simalungun Resmikan Dua TK Negeri Pembina, Perkuat Program Wajib Belajar 13 Tahun

Simalungun, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun meresmikan dua unit Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina di Kecamatan Dolok Panribuan dan Kecamatan Tanah Jawa sebagai upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) sekaligus mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun.

Peresmian dilakukan Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, Ny. Darmawati Anton Achmad Saragih, di TK Negeri Pembina Kecamatan Dolok Panribuan, Selasa (28/7/2026). Kegiatan diawali dengan pemotongan pita sebagai tanda dimulainya operasional sekolah.

Selain meresmikan gedung sekolah, Bunda PAUD juga melakukan penanaman pohon di lingkungan sekolah sebagai simbol kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mengajarkan

Bunda PAUD Kabupaten Simalugun, Ujut Nyata Bangun dan resmikan Dua Unit TK Negeri ,Kec Dolok Panribuan, Kecamatan Tanah Jawa, Langkah strategis dukung Pelaksanaan Progam Wajib Belajar 13 Tahun. (Foto/Hms)

anak-anak mencintai alam sejak usia dini.

Dalam kunjungan tersebut, Ny. Darmawati didampingi Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, Ny. Yulince Mixnon Andreas Simamora, beserta jajaran. Rombongan meninjau fasilitas sekolah dan berinteraksi dengan para peserta didik, guru, serta orang tua.

Camat Dolok Panribuan, Nopen Sijabat, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini. Ia berharap kehadir-

▸▸ Halaman 5

Satlantas Polres Way Kanan Sosialisasikan Aplikasi Siger Lampung Presisi, Permudah Aks Layanan Polisi

Way Kanan, Jaya Pos

Satlantas Polres Way Kanan menyosialisasikan aplikasi Siger Lampung Presisi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepolisian berbasis digital sekaligus mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Kegiatan berlangsung di Jalan Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Kamis (30/7/2026).

Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP Sulkhan mengatakan, Polda Lampung terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi "Siger Lampung Presisi" yang dapat diakses langsung melalui telepon genggam.

Dalam sosialisasi tersebut, per-

Satlantas Polres Way Kanan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengenalan Aplikasi, siger Lampung presisi.(Dok Hms)

sonel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Way Kanan menyapa pengendara roda empat yang melintas. Petugas memberikan edukasi mengenai cara mengunduh, mengaktifkan, dan memanfaatkan berbagai fitur layanan yang tersedia dalam aplikasi.

AKP Sulkhan menjelaskan, aplikasi Siger Lampung Presisi menyediakan berbagai layanan kepolisian, termasuk fitur permintaan

▸▸ Halaman 5

Kayu olahan berbentuk balok (Plat), yang diduga hasil pembalakan liar banyak ditemukan di wilayah Kelurahan Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. (foto dok : peserta anonim)

Dugaan Pembalakan Liar di Murung Raya Disorot, Aparat Diminta Selidiki Klaim Warga

Palangka Raya, Jaya Pos

Dugaan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah beredar foto dan video tumpukan kayu olahan yang diduga berasal dari aktivitas penebangan ilegal di media sosial.

Informasi tersebut beredar melalui grup Facebook *Info Murung Raya Terkini* pada Rabu (29/7/2026). Unggahan dari akun anonim itu menyebut adanya dugaan aktivitas pembalakan liar yang berlangsung di wilayah tersebut dan meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan.

Dalam unggahan tersebut juga muncul tudingan adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu. Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut belum terverifikasi dan belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Pemilik akun menyebut dugaan pembalakan liar itu telah berlangsung cukup lama dengan skala aktivitas yang cukup besar. Ia juga meminta aparat kepolisian, baik Polsek Permata Intan maupun Polres Murung Raya, menindaklanjuti informasi tersebut apabila ditemukan adanya

▸▸ Halaman 5

Miris! Bermodal Janji Dinikahi, Anak Bawah Umur di Trenggalek Jadi Korban Persetubuhan

Trenggalek, Jaya Pos

Miris, kasus dugaan persetubuhan dan pencabulan kembali terjadi di Kabupaten Trenggalek yakni di wilayah Kecamatan Munjungan. Kali ini menimpa korban yang masih berumur 12 tahun dan berstatus pelajar SD.

Dengan bermodal iming-iming dinikahi, terduga pelaku berinisial AN berhasil memperdaya korban hingga terjadi peristiwa tidak senonoh tersebut.

Kini, terduga pelaku (AN) remaja berusia 18 tahun itupun terpaksa harus merasakan dinginnya sel tahanan. Hal itu didasarkan atas penetapan tim penyidik Satreskrim Polres Trenggalek usai dilakukan rangkaian penyelidikan dan pemeriksaan kepadanya.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti dan keterangan saksi-saksi diduga kuat tersangka mengelabuhi korban dengan janji akan

Ilustrasi kasus pencabulan dan persetubuhan di bawah umur. (JP/ist)

dinikahi. Sedangkan untuk perbuatan tersebut berlangsung pada April 2026 di rumahnya.

Kejadian tindak pidana terungkap setelah pihak keluarga korban melaporkan kasus ke Polres Trenggalek. Berawal ketika kronologis kisah yang di alami (korban) diceritakan kepada orang tuanya.

Semua bermula, masih lanjut AKBP Ridwan, saat AN (tersangka) mengajak korban bermain ke pantai daerah setempat. Melalui aplikasi WhatsApp, korban dihubungi agar mau bertemu dan mengantarnya berwisata.

Karena tidak menaruh kecurigaan, ajakan itu di penuhi oleh korban dengan mendatangi rumah AN. Sesampai di tempat kejadian perkara (TKP) tersangka membatalkan rencana dan malah mengajak korban kedalam kamar.

Menerima laporan, tandasnya, petugas segera melaksanakan penyelidikan dalam rangka tahapan proses hukum. Tersangka berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti terkait dengan tindakan yang dilakukan.

Terhadap perbuatan tersebut, AN dijerat menggunakan pasal persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). **(JP)**

Bantu Pertanian Bejalan Baik di Trenggalek, Bhabinkamtibmas Desa Ngetal Edukasi Warga

Bhabinkamtibmas Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan sedang membantu warga dilahan pertanian. (JP/HWi)

Trenggalek, Jaya Pos

Guna membantu hasil pertanian berjalan baik di wilayah Trenggalek, peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) di optimalkan. Hal itu, sebagai salah satu upaya dalam percepatan capaian program Asta Cita yang di canangkan pemerintah pusat.

Yakni, misi dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pemenuhan Ketahanan Pangan Nasional. Mengingat melalui kehadiran mereka (Bhabinkamtibmas) di desa binaan terasa dampak positifnya bagi para petani.

Bahkan, melalui para petugas dilapangan tersebut banyak kendala yang dihadapi mampu dicarikan solusi terbaik. Sebagaimana dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan dengan rutin mendampingi pengelola lahan.

Kabag SDM Polres Trenggalek Kompol Sudaroini saat di konfirmasi JAYA POS menyampaikan jika pihaknya hingga sekarang ini secara berkelanjutan terus mengawal seluruh agenda pusat agar benar-benar tuntas maksimal.

"Terstruktur dan berkelanjutan, Bag SDM Polres Trenggalek juga terus memberikan motifasi serta peningkatan kapasitas bagi jajaran," sebut Kompol Sudaroini, Jum'at 31 Juli 2026.

Menurut dia, tujuan terstruktur dari misi itu lebih kepada penguatan personel. Petugas di pastikan senantiasa aktif mendampingi dan memastikan program - program mampu tercapai. Pasalnya, ada target capaian yang telah ditetapkan.

"Arahan dari komando atas sudah jelas dan terukut. Termasuk program ketahanan pangan demi mewujudkan Swasembada Pangan Indonesia," ujarnya.

Kabag SDM lebih lanjut menambahkan, bahwa semua personel yang ada bisa dipastikan berkompeten. Baik dari sisi kemampuan maupun integritas saat melaksanakan setiap tugas. Rambu-rambu petunjuk serta arahan teknis pun sudah terdistribusikan sesuai jenjang.

Sebagai misal, petugas ketika turun ke wilayah tidak hanya untuk sekedar melihat atau mengawasi aktifitas masyarakat saja. Pun begitu, wajib pula memberikan edukasi serta solusi bagi kelompok tani di daerah binaan. "Dipastikan, semua personel sudah memahami sekaligus menguasai teknisnya. Satu hal, petugas harus rajin dan rutin ke wilayah binaan. Jangan malu berkomunikasi dan bersinergi dengan unsur-unsur yang ada," tandas Kabag SDM.

Sebagai contoh, ketika pada tahap persiapan atau saat proses perawatan tanaman. Bhabinkamtibmas wajib membantu mencarikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Tiap petugas harus memiliki pengetahuan dan banyak referensi mengenai dinamika ditengah masyarakat. Sehingga, tidak boleh malas berdiskusi, melakukan sharing ataupun berbagi ilmu bersama stakeholder.

"Optimalkan tiap potensi, termasuk perbanyak referensi dan pengetahuan. Karena yang di tangani bukan hanya sekedar 'problem solving' saja. Tidak boleh malas atau sungkan untuk berdiskusi dengan stakeholder terkait dan juga warga setempat," tegasnya.

Tidak lupa, mantan Kapolsek Panggul itupun memberikan apresiasi kepada seluruh Bhabinkamtibmas jajaran Polres Trenggalek atas kinerja mereka selama ini. Tanpa kenal lelah, bersinergi memberikan seluruh ilmu, waktu maupun tenaga demi masyarakat. Sehingga dampak positif serta kemanfaatan benar-benar dirasakan oleh khalayak luas tanpa meminta imbalan.

"Terimakasih atas peran maupun kinerja seluruh rekan-rekan Bhabinkamtibmas, semoga menjadikan amal dan kemanfaatan bagi masyarakat," pungkas Kompol Sudaroini. **(JP/HWi)**

DPRD Pasuruan Desak Evaluasi Titik Rawan Kecelakaan di Jalan Nasional Gempol

Kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan ke BBPJN, membahas mengenai titik jalan yang rentan akan kecelakaan. (Foto :Ist)

Pasuruan, Jaya Pos

Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan mendesak pengelola jalan nasional segera melakukan kajian menyeluruh terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di wilayah Gempol, termasuk Simpang Patung Sapi. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah kecelakaan serupa terus berulang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, mengatakan tingginya angka kecelakaan di ruas jalan nasional tersebut harus menjadi dasar dilakukannya evaluasi, bukan menunggu muncul korban berikutnya.

"Kalau kejadian kecelakaan terus berulang, harus ada evaluasi. Kami meminta dilakukan kajian dan perbaikan sarana di titik-titik rawan kecelakaan sebagai langkah pencegahan," kata Daniyal, Selasa (28/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali dan bertemu Kepala Bidang Preservasi I BBPJN Jawa Timur, Okto Ferry Silitonga.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III meminta kajian tidak hanya berfokus pada kondisi fisik jalan, tetapi juga mempertimbangkan pola pergerakan kendaraan, karakter lalu lintas, serta kebutuhan fasilitas keselamatan di lokasi yang dinilai rawan kecelakaan.

Menurut Daniyal, ruas jalan nasional memiliki karakteristik berbeda karena dilalui kendaraan dengan volume tinggi, termasuk kendaraan berat, serta memiliki titik persimpangan yang kompleks. Karena itu, rekayasa lalu lintas dinilai perlu menjadi bagian dari solusi.

"Yang kami dorong bukan hanya perbaikan jalan. Rekayasa lalu lintas juga perlu dikaji agar pengguna jalan lebih aman dan risiko kecelakaan dapat ditekan," ujarnya.

Ia menegaskan setiap rekomendasi harus didasarkan pada kajian teknis agar langkah yang diambil benar-benar efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

"Kami berharap hasil kajian menghasilkan solusi yang tepat. Jangan sampai perbaikan baru dilakukan setelah kembali terjadi kecelakaan," tegasnya.

Selain itu, Komisi III juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pengelola jalan nasional semakin diperkuat. Mengingat, kewenangan pengelolaan ruas jalan nasional berada di pemerintah pusat.

"Kami ingin jalan nasional di Kabupaten Pasuruan tidak hanya lancar dilalui, tetapi juga memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan," tambah Daniyal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Preservasi I BBPJN Jawa Timur, Okto Ferry Silitonga, menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan terkait peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan nasional.

"Masukan dari DPRD Kabupaten Pasuruan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan evaluasi sesuai kewenangan dan hasil kajian teknis. Aspek keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian dalam pengelolaan jalan nasional," kata Okto.

(Wio)

Terpicu Cemburu, Pria di Trenggalek Diduga Aniaya Mantan Pacar Istrinya dengan Pisau

Trenggalek, Jaya Pos

Gegara dipicu api cemburu, seorang pria asal Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Trenggalek diduga nekat tikam mantan pacar istrinya.

Terduga pelaku berinisial A menyerang korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius. Bahkan, AK (korban) harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki kepada awak media bahwa peristiwa yang terjadi bermula dari kecemburuan. Karena menganggap, korban masih menjalin hubungan khusus dengan sang istri.

"Peristiwa terjadi diduga karena cemburu terhadap korban," sebutnya.

Menurut AKBP Ridwan Maliki, awalnya terduga pelaku menghubungi istri korban agar bersama-sama bertemu. Tujuan utamanya, membahas sekaligus menanyakan tentang kisah asmara masa lalu pasangan.

"Tersangka sengaja mengundang korban untuk membahas dugaan hubungan masa lalu antara korban dengan istrinya. Namun, di lokasi justru terjadi perselisihan yang berujung pada penganiayaan," ujar Kapolres.

Menurut dia, dari hasil penyidikan petugas, kronologis terungkap bahwa mereka bertemu di GOR Gajah Putih

Gelaran press release di Mapolres Trenggalek. (JP/HWi)

Trenggalek pada Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 15.01 WIB. Terduga yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka datang lebih dahulu bersama istrinya.

"Tak berselang lama, didampingi istrinya juga korbanpun datang menyusul," imbuhnya.

Kedatangan korban, masih kata Kapolres, untuk memberikan klarifikasi mengenai permasalahan yang tuduhkan. Mendengar itu, tersangka tidak mau menggubrisnya malah menanggapi dengan emosional.

Bahkan, ketika korban sedang menjelaskan kronologi hubungan masa lalunya tersangka langsung mengeluarkan sebilah pisau dari balik jaketnya.

"Ketika korban memberikan penjelasan jujur terkait persoalan yang dipermasalahkan. Tersangka malah emosi dengan mengeluarkan pisau dari jaketnya," sebut AKBP Ridwan.

Tidak mau terluka, masih sambung dia, korban berusaha menghindari serangan tersangka dan sempat melukai tangan kirinya. Akibat serangan itu membuat korban terjatuh di atas aspal.

Kurang puas, tersangka terus mendekat untuk menusuk perut korban yang spontan di respon dengan mencengkeram bilah pisau dengan maksud menggagalkan serangan. Tindakan tersebut berhasil melindungi perut tetapi telapak tangan kanannya mengalami luka robek yang dalam.

Kejadian itupun di laporkan ke SPKT Polres Trenggalek dan langsung dilakukan penanganan."Setelah menerima laporan, Tim Opsnal Satreskrim Polres Trenggalek langsung bergerak. Di hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, tersangka bersama barang bukti berhasil diamankan di rumahnya," jelasnya.

Motif sementara, tegas mantan Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim itu, murni disebabkan oleh rasa cemburu. Hingga saat ini, tim penyidik terus bekerja untuk melengkapi seluruh alat bukti tindak pidana.

Atas perbuatan tersebut, terhadap tersangka dikenakan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penganiayaan. "Tersangka diancam pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan," pungkas AKBP Ridwan. **(HWi)**

Bupati Tanjabbar Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, 100 Ton Sampah Masuk TPA Setiap Hari

Bupati Anwar Sadat (kanan) Foto Bersama Anggota DPR RI Syarif Fasha (Dok Prokopim)

Kualatungkal, Jaya Pos

Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kesadaran warga.

Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan "Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta Pengelolaan Limbah B3" di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. H. Syarif Fasha, S.E., M.E. Program ini digelar di sejumlah daerah sebagai upaya memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan persampahan.

Dalam sambutannya, Syarif Fasha mengatakan persoalan sampah saat ini telah menjadi isu nasional yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Menurutnya, pola pengelolaan sampah harus berubah, tidak hanya sebatas mengangkut sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi dimulai dari pengurangan dan pemilahan sejak dari sumbernya.

"Pemerintah menargetkan pengurangan sampah minimal 30 persen dari sumbernya. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah," ujar Syarif Fasha.

Ia berharap masyarakat dapat membentuk komunitas peduli lingkungan yang mampu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah.

Syarif Fasha juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini masih berada dalam status pengawasan dalam pengelolaan sampah. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, status tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi daerah pembinaan pada tahun mendatang.

Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi XII DPR RI atas dukungan melalui kegiatan tersebut.

Menurutnya, Bimtek dan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sekaligus membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih baik.

"Persoalan sampah di Tanjabbar masih menghadapi berbagai tantangan. Saat ini sekitar 100 ton sampah dari wilayah Kualatungkal diangkut setiap hari menuju TPA," kata Anwar Sadat.

Ia menjelaskan, pengelolaan sampah masih terkendala sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan armada pengangkut, jumlah petugas, kemampuan anggaran daerah, hingga kondisi geografis wilayah.

Menurutnya, karakteristik wilayah Tanjabbar yang dipengaruhi pasang surut air laut, kawasan gambut, dan rawa basah menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga menjadi persoalan yang membutuhkan edukasi secara berkelanjutan.

Bupati mengingatkan, persoalan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam ekosistem perairan. Sebagai salah satu daerah penghasil ikan dan udang di Provinsi Jambi, pencemaran sampah plastik berpotensi memengaruhi kualitas hasil perikanan akibat munculnya mikroplastik.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Tanjabbar secara rutin melakukan pembersihan drainase pada malam hari melalui tim lintas perangkat daerah. Kegiatan itu bertujuan mengangkat sampah dan sedimen, menjaga kelancaran aliran air, serta mengurangi risiko banjir tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami mengajak masyarakat mulai membiasakan memilah dan mengolah sampah dari rumah. Sampah yang dibawa ke TPA nantinya hanya sampah residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi," ujar Anwar Sadat.

Melalui kegiatan Bimtek dan sosialisasi tersebut, Pemkab Tanjabbar berharap terbangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Staf Ahli Bupati, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjabbar, pimpinan OPD, Kepala Bagian SDA Setda Tanjabbar, Camat Tungkal Ilir, lurah dan kepala desa, pengelola TPA, mahasiswa, pegiat lingkungan, Tim TPS3R, serta peserta sosialisasi. **(Tenk)**

Dugaan Tanggul Irigasi Jadi Jalan Angkutan Sawit PT MKM Pulang Pisau Disorot

Ka. Perwakilan Jaya Pos Kalteng, Mandau Suwandi saat memantau kegiatan PT.MKM melakukan perbaikan tanggul irigasi yang akan dijadikan jalan angkutan. (Foto Dok : Japos)

Palangka Raya, Jaya Pos

Dugaan pemanfaatan tanggul irigasi pertanian sebagai jalan angkutan operasional oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Menteng Kencana Mas (MKM) di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan.

Penggunaan infrastruktur irigasi tersebut diduga untuk aktivitas kendaraan perusahaan, termasuk truk pengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan pupuk. Kondisi itu memunculkan pertanyaan terkait fungsi infrastruktur, aspek teknis, serta legalitas pemanfaatan aset negara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jaya Pos dari sejumlah sumber di lapangan, tanggul yang berada dalam sistem jaringan irigasi pertanian tersebut diduga dimanfaatkan sebagai akses transportasi perusahaan.

Selain dugaan penggunaan tanggul, PT MKM juga disebut mengelola lahan sekitar 36 hektare yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian dan kemudian dikembangkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Di lokasi tersebut terdapat infrastruktur irigasi yang disebut berupa sembilan saluran sekunder dan satu saluran kolektor beserta tanggul pembatas. Infrastruktur itu merupakan bagian dari sistem pengairan pertanian yang memiliki fungsi strategis.

Apabila dugaan pemanfaatan tersebut terbukti, penggunaan aset irigasi di luar fungsi awalnya dapat menimbulkan persoalan terkait pengelolaan aset negara serta perlindungan infrastruktur pertanian.

Ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Sementara pengelolaan sumber daya air dan perlindungan lahan pertanian juga memiliki aturan tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berpotensi Ganggu Fungsi Irigasi

Sistem irigasi di wilayah Belanti Siam diketahui berada di bawah pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II.

Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung distribusi air pertanian, menjaga stabilitas tanggul, serta membantu pengendalian banjir dan intrusi air.

Pada 2025, BWS Kalimantan II juga diketahui melakukan pembangunan sejumlah pintu air klep dan gorong-gorong berbahan fiberglass sebagai bagian dari peningkatan jaringan irigasi.

Namun, sejumlah pihak yang mengetahui kondisi lapangan menilai infrastruktur tersebut dirancang untuk mendukung sistem pengairan, bukan sebagai jalur kendaraan berat.

Penggunaan rutin oleh kendaraan dengan muatan besar dikhawatirkan dapat memberikan tekanan terhadap struktur tanggul dan berpotensi mempercepat kerusakan apabila tidak sesuai dengan peruntukannya.

Jika terjadi kerusakan terhadap infrastruktur yang masih dalam masa pemeliharaan, muncul pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap perbaikan maupun potensi kerugian negara.

Perlu Penjelasan Status Perizinan

Selain aspek teknis, pemanfaatan tanggul irigasi sebagai akses operasional perusahaan juga membutuhkan kejelasan mengenai status perizinannya.

Publik perlu mengetahui apakah penggunaan fasilitas irigasi tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi dari instansi pengelola, mengingat infrastruktur tersebut dibangun menggunakan anggaran negara dan memiliki fungsi pelayanan publik.

Pengamat tata kelola sumber daya air menilai setiap perubahan fungsi jaringan irigasi harus melalui kajian teknis dan mekanisme perizinan yang jelas agar tidak mengganggu keberlanjutan sistem pertanian.

Menurutnya, infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan sehingga pemanfaatannya harus tetap sesuai peruntukan.

Sementara itu, Jaya Pos Perwakilan Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada manajemen PT Menteng Kencana Mas melalui surat Nomor 074/HJP-KT/VII/2026 tertanggal 13 Juli 2026.

Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan terkait dugaan pemanfaatan tanggul irigasi sebagai jalan angkutan, status perizinan penggunaan aset, serta klarifikasi mengenai dugaan penguasaan lahan pertanian yang dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Menteng Kencana Mas belum memberikan tanggapan resmi kepada Jaya Pos. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi apabila pihak terkait menyampaikan penjelasan.

(Mandau)

Enam Paket Jasa Non Konstruksi P2JN Kalbar Rp19,7 Miliar Disorot

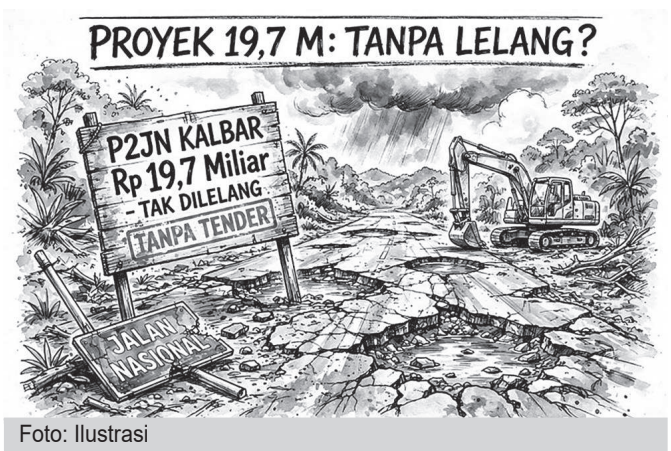

Foto: Ilustrasi

Kalbar, Jaya Pos

Enam paket kegiatan non konstruksi di Bagian Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kalimantan Barat dengan nilai total sekitar Rp19,7 miliar menjadi perhatian publik. Sorotan muncul karena proses pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme "Pemilihan Langsung (PL).

Sejumlah masyarakat mempertanyakan penggunaan metode tersebut karena menilai pekerjaan pemerintah dengan nilai miliaran rupiah, baik konstruksi maupun non konstruksi, semestinya dilakukan melalui proses lelang terbuka.

Menanggapi hal itu, Kepala Satker P2JN Kalimantan Barat, "Koswari Abizar", memberikan penjelasan. Ia menyebut proses pengadaan tidak dilakukan melalui pemilihan langsung biasa, melainkan menggunakan mekanisme "Repeat Order (Penunjukan Langsung Permintaan Berulang)" sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Proses pengadaan barang/jasa pada pekerjaan yang dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme Repeat Order (Penunjukan Langsung Permintaan Berulang), yang merupakan salah satu mekanisme pemilihan penyedia jasa konsultansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Koswari kepada Jaya Pos melalui surat digital, Kamis (31/7/2026).

Menurut Koswari, mekanisme Repeat Order hanya dapat diterapkan apabila pekerjaan telah memenuhi persyaratan, kriteria, serta tata cara yang telah diatur dalam regulasi.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pengadaan tersebut mengacu pada sejumlah aturan, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2022, serta Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2024.

"Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap berpedoman pada prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel," tegas Koswari.

Ia memastikan proses pengadaan jasa konsultansi tersebut tetap mengikuti aturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

(HARDI)

Wakil Bupati Tanjabbar Lantik 16 Pejabat, Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Kualatungkal, Jaya Pos

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., melantik dan mengambil sumpah 16 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar.

Pelantikan berlangsung di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin (27/7/2026). Para pejabat yang dilantik terdiri dari satu camat, sembilan pejabat administrator, dan enam pejabat pengawas.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas. Selanjutnya, Wakil Bupati memimpin pengambilan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta pakta integritas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Katamso mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

Wabup Katamso (kiri) Saat Lantik 16 Pejabat dilingkup Tanjabbar (Dok Prokopim)

"Setiap jabatan adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, para pejabat harus segera beradaptasi, bekerja cepat, dan menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas masing-masing," ujar Katamso.

Ia secara khusus meminta Camat Kuala Betara mampu membangun sinergi dengan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta menghadirkan inovasi di wilayahnya.

Sementara kepada pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Bupati meminta agar bekerja profesional dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan pengelolaan sampah, mengendalikan pencemaran, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Katamso juga meminta seluruh pejabat yang dilantik mendukung program prioritas Pemkab Tanjabbar, di antaranya percepatan penanganan anak putus sekolah, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan status Open Defecation Free (ODF), serta perbaikan tata kelola persampahan.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta terus memperbarui data kependudukan sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menutup sambutannya, Wakil Bupati berpesan agar seluruh ASN menjaga etika, loyalitas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu memberikan kontribusi nyata serta mendukung percepatan pembangunan menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semakin maju.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Tanjabbar Hermansyah, S.STP., M.H., Staf Ahli Bupati, Asisten II dan Asisten III Setda, Kepala BKPSDM, sejumlah kepala OPD, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta tamu undangan lainnya.

(Tenk)

Bupati Deli Serdang Tinjau Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 101921 Karang Anyar

Beringin, Jaya Pos

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meletakkan batu pertama pembangunan ruang kelas baru bertingkat di UPT SPF SD Negeri 101921 Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Rabu (29/7/2026).

Pembangunan ruang kelas baru tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari kalender. Penambahan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sekolah, menambah daya tampung siswa, sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta kepala sekolah dan para guru mengawasi aktivitas siswa selama proses pembangunan berlangsung agar kegiatan belajar tetap berjalan dengan aman. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar hasil pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Bupati Tinjau Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 101921 Karang Anyar. (Foto: ist)

"Pembangunan ini bukan hanya menambah ruang belajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, proses pengerjaannya harus diawasi bersama agar selesai dengan baik dan dapat segera dimanfaatkan oleh siswa," ujar Asri Ludin Tambunan.

Kunjungan tersebut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Suparno, dan disambut Kepala UPT SPF SD Negeri 101921 Karang Anyar, Leni Andriana.

Pembangunan ruang kelas baru ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih nyaman dan berkualitas bagi para siswa.

(Ramdani)

PLN Batam Suplai Listrik 690 MVA untuk Altiva Datacenter, Investasi Digital Nongsa Mulai 2027

Penandatanganan PJBTL disaksikan oleh Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam ex officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, Rabu (28/7/2026). (Foto/Humas)

Batam, Jaya Pos

PT PLN Batam dan PT Altiva Identity Datacenter resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan total kebutuhan daya mencapai "2 x 345 Megavolt Ampere (MVA) atau sekitar 690 MVA.

Kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan "Altiva Datacenter" di Kawasan Ekonomi Digital Nongsa, Batam. Pasokan listrik untuk proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2027.

Penandatanganan PJBTL berlangsung pada Rabu (28/7/2026) dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, serta Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

Turut hadir jajaran pejabat BP Batam, Direktur PT Altiva Identity Datacenter Edi Haryanto beserta jajaran, serta Komisaris dan Direksi PT PLN Batam.

Amsakar Achmad mengatakan, kerja sama tersebut menjadi salah satu pintu masuk bagi penguatan investasi sektor teknologi digital di Batam.

Menurutnya, Batam memiliki berbagai keunggulan sebagai lokasi pengembangan pusat data, mulai dari posisi geografis yang strategis, kedekatan dengan Singapura, hingga konektivitas yang mendukung aktivitas ekonomi regional.

"Dengan kesiapan pasokan listrik dari PLN Batam, kami dari sisi pemerintah siap mendukung kebutuhan investor agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat," katanya.

Amsakar menilai masuknya investasi data center berskala besar menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital.

Ia berharap momentum investasi pada 2026 dan 2027 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi teknologi.

"Batam harus terus membangun narasi positif sebagai daerah tujuan investasi dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baru," tegasnya.

PLN Batam Pastikan Kesiapan Energi

Direktur Utama PT PLN Batam menyampaikan bahwa kerja sama dengan Altiva Datacenter menjadi bukti kepercayaan investor terhadap kesiapan sistem kelistrikan Batam.

Melalui PJBTL tersebut, PLN Batam berkomitmen menyediakan kebutuhan energi untuk operasional pusat data yang membutuhkan pasokan listrik besar dan stabil.

"Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi energi bagi perkembangan ekonomi digital di Batam," ujarnya.

Menurutnya, kepastian pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan perusahaan data center dalam menentukan lokasi investasi.

Karena itu, PLN Batam terus melakukan penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan agar mampu memenuhi kebutuhan industri skala besar.

Altiva Dorong Batam Jadi Hub Digital

Sementara itu, Direktur PT Altiva Identity Datacenter, Edi Haryanto, mengatakan pembangunan fasilitas data center tersebut tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi dalam mendorong transformasi digital Batam.

Menurutnya, dukungan BP Batam, PLN Batam, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam pengembangan proyek tersebut.

Proyek Altiva Datacenter dikembangkan di Kawasan Nongsa dengan luas lahan awal sekitar 11 hektare dan direncanakan berkembang hingga lebih dari 30 hektare secara bertahap.

Dengan dukungan infrastruktur energi dari PLN Batam, proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital nasional sekaligus meningkatkan daya saing Batam sebagai destinasi investasi teknologi.

Kehadiran pusat data berskala besar ini juga diproyeksikan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, baik melalui investasi, kebutuhan tenaga kerja, maupun pengembangan industri pendukung.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BP Batam, PLN Batam, dan sektor swasta, Batam terus diarahkan menjadi salah satu pusat ekonomi digital unggulan di kawasan Asia Tenggara.**(Hat)**

Pemkab Simalungun Gelontorkan Belasan Miliar Rupiah Bangun Infrastruktur Dolok Silou

Simalungun, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengalokasikan anggaran belasan miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Dolok Silou pada Tahun Anggaran 2026. Program tersebut difokuskan pada perbaikan jalan, irigasi, fasilitas pertanian, hingga sarana pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Dolok Silou, Selasa (28/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Darmawati Anton Achmad Saragih, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran TP PKK Kabupaten Simalungun.

Menurut Bupati, Dolok Silou merupakan salah satu sentra pertanian yang memiliki potensi besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung infrastruktur yang memadai agar distribusi hasil panen lebih lancar dan kesejahteraan petani terus meningkat.

"Kami terus berupaya membangun infrastruktur pendukung agar produksi pertanian meningkat, distribusi hasil panen semakin lancar, dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang secara bertahap," ujar Anton.

Kadis PUPR Damping Bupati siamlungun Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Dolok silau. (Foto/Rd)

Bupati menilai pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki pelayanan publik di Kecamatan Dolok Silou.

Anton mengajak masyarakat ikut mengawasi dan mendukung pelaksanaan seluruh proyek agar berjalan sesuai rencana.

"Mari kita jaga semangat kebersamaan dan gotong royong agar seluruh pembangunan dapat selesai tepat waktu dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Camat Dolok Silou, Agustin Ginting, mengapresiasi perhatian Pemkab Simalungun terhadap pembangunan di wilayahnya.

"Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Dolok Silou. Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati atas komitmennya membangun kecamatan kami," ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat J. Paranginangin menyebut rehabilitasi jalan Cingkes–Bawang sangat dinantikan warga karena menjadi akses utama bagi delapan nagori sekaligus jalur penghubung menuju Kabupaten Karo.

"Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Perbaikannya akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga," katanya.

Melalui alokasi anggaran tersebut, Pemkab Simalungun berharap pembangunan infrastruktur dapat memperkuat sektor pertanian, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Kabupaten Simalungun.**(RD)**

Kabar Kades Lubuk Sahung Mukomuko Ali Martinus Mundur

Camat: Surat Baru Dikirim via WhatsApp

Mukomuko, Jaya Pos

Kepala Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Ali Martinus, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa.

Kabar tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Hingga kini, alasan pengunduran diri Ali Martinus belum diketahui secara pasti, terlebih masa jabatan kepala desa tinggal sekitar dua bulan lagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Camat Selagan Raya, Yulia, membenarkan adanya surat pengunduran diri tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (26/7/2026).

Foto: Ilustrasi

"Benar. Namun kami belum mengetahui secara pasti alasan Kades Lubuk Sahung mengundurkan diri karena surat pengunduran diri itu baru disampaikan kepada kami melalui WhatsApp," kata Yulia.

Menurutnya, pihak kecamatan telah menyurati Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Sahung agar segera menggelar rapat koordinasi terkait pengunduran diri kepala desa tersebut.

"Kami sudah meminta BPD segera melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri itu," ujarnya.

Yulia mengaku pihak kecamatan telah berupaya menghubungi Ali Martinus setelah menerima surat tersebut. Namun, telepon seluler yang bersangkutan tidak aktif.

"Kami juga langsung mendatangi kediamannya, tetapi yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Darsono, mengaku belum menerima informasi terkait pengunduran diri Ali Martinus.

"Sejauh ini belum ada informasi, baik secara pribadi maupun secara kedinasan," kata Darsono.

Hingga berita ini ditulis, alasan pengunduran diri Ali Martinus masih belum diketahui dan pihak terkait masih menunggu hasil koordinasi serta tindak lanjut dari BPD Desa Lubuk Sahung. **(Japri)**

Polres Way Kanan Tingkatkan Patroli Cegah Curanmor dan Kejahatan Jalanan

Way Kanan, Jaya Pos

Polres Way Kanan meningkatkan patroli preventif dan patroli hunting untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kejahatan jalanan, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya, Rabu (29/7/2026).

Patroli difokuskan di ruas Jalan Kampung Bumi Ratu, jalur Sri Wijaya–Negeri Agung hingga menuju Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Kawasan tersebut dinilai sebagai salah satu titik yang rawan terjadi tindak kriminal.

Selain berpatroli, personel Polres Way Kanan juga melakukan patroli dialogis dengan warga. Dalam kegiatan itu, polisi memberikan imbauan kamtibmas agar masyarakat lebih waspada terhadap aksi kriminalitas, terutama curanmor. Warga juga diajak berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan.

Patroli dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait meningkatnya aksi curanmor di sejumlah lokasi. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus menjaga situasi kamtibmas dan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) tetap kondusif.

Polres Way Kanan, mengelar patroli preventip dan patroli hunting. (Dok Humas)

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K. melalui Kasihumas Polres Way Kanan Iptu Edi Tamizar menegaskan patroli rutin akan terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan untuk menekan angka kriminalitas.

"Kami terus mengoptimalkan patroli di titik-titik rawan sebagai upaya mencegah tindak pidana, khususnya curanmor dan kejahatan jalanan," kata Iptu Edi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu mengunci kendaraan dengan baik, tidak memarkir kendaraan di tempat yang sepi, serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.**(Suhaili)**

Komisi III DPRD Langkat Kembali Mediasi Rencana Pembangunan KDMP

RDP masyarakat Tanjung Beringin terkait pembangunan KDMP dengan Komisi III DPRD Langkat, (foto/ humas DPRD Langkat)

Kabupaten Langkat, Jaya Pos

Komisi III DPRD Kabupaten Langkat kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lahan Pasar Senin, Pasar 4,5 Tanjung Beringin, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Selasa (28/7/2026).

RDP lanjutan ini digelar setelah sebelumnya Komisi III DPRD Langkat memutuskan mendukung aspirasi para pedagang yang menolak pembangunan KDMP di lokasi tersebut. Namun, karena pengurus KDMP mengajukan permohonan agar dilakukan mediasi kembali, DPRD membuka ruang dialog melalui RDP kedua.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, dan dihadiri Kepala Dinas Koperasi, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Camat Hinai, Kepala Desa Suka Damai, pengurus KDMP serta puluhan pedagang Pasar Senin.

"Hari ini kami kembali menggelar RDP untuk membuka ruang dialog. Pengurus KDMP meminta dilakukan mediasi ulang karena pada RDP pertama mereka tidak hadir. Sebagai wakil rakyat, kami memfasilitasi semua pihak agar dapat menyampaikan pendapatnya," ujar Pimanta Ginting saat membuka rapat.

Dalam forum tersebut, Pengurus KDMP, Eliansyah, menjelaskan bahwa pembangunan koperasi merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa. Menurutnya, keberadaan KDMP juga akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, terutama di tengah berkurangnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.

Eliansyah juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan di tingkat desa, yang menurutnya, menghasilkan kesepakatan bahwa para pedagang tidak keberatan dengan pembangunan KDMP. Ia menegaskan koperasi tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi para pedagang di sekitar lokasi dan mengaku telah memperoleh izin dari Disperindag.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh juru bicara pedagang, H. Rangkuti. Ia menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan karena merasa tidak diundang dalam pertemuan yang dimaksud.

Dalam RDP, para pedagang tetap mempertahankan sikap menolak pembangunan KDMP di lahan Pasar Senin dan meminta seluruh pihak menghormati hasil RDP sebelumnya yang merekomendasikan agar pembangunan tidak dilakukan di lokasi tersebut.

"Beli saja lahan yang lain untuk membangun KDMP. Itu solusi yang kami usulkan," ujar para pedagang.

Setelah mendengarkan seluruh masukan, saran, dan pendapat dari para peserta rapat, Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, menyimpulkan bahwa Komisi III tetap sependapat dengan aspirasi para pedagang. DPRD meminta Camat Hinai dan Kepala Desa Suka Damai memfasilitasi Pengurus KDMP untuk mencari lokasi alternatif sebagai tempat pembangunan koperasi di wilayah Kecamatan Hinai.

Selain itu, Pimanta juga meminta Disperindag agar terus melakukan penataan terhadap para pedagang sekaligus menjaga aset pasar dengan baik sehingga pendapatan retribusi dapat tetap diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengimbau para pedagang untuk tetap menjaga ketertiban dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

(Fatimah)

Mobil Listrik Jadi Daya Tarik..... *Halaman 1*

puncak pada pengumuman grand prize berupa satu unit mobil listrik.

Program ini merupakan bagian dari strategi Ancol dalam meningkatkan pengalaman pelanggan melalui program loyalitas Ancol Points. Tidak hanya menghadirkan kesempatan memenangkan hadiah, kegiatan tersebut juga dikemas menjadi sebuah hiburan yang melibatkan pengunjung secara aktif selama proses pengundian berlangsung.

Berbeda dengan pengundian pada umumnya, seluruh rangkaian acara dilakukan secara terbuka. Pengunjung dapat menyaksikan setiap tahapan mulai dari persiapan, proses pengundian hingga penetapan pemenang, sehingga menciptakan rasa percaya sekaligus memastikan pelaksanaan berjalan transparan.

Sebelum pengundian dimulai, dilakukan penyegelan perangkat undian yang disaksikan oleh manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, notaris, serta perwakilan Dinas Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia. Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan program.

Selain menyuguhkan kemeriahan undian, Ancol juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat menjadi anggota Ancol Points. Melalui aplikasi tersebut, pengunjung dapat mengumpulkan poin dari setiap transaksi di kawasan Ancol dan menukarkannya dengan berbagai voucher, reward, maupun keuntungan eksklusif lainnya.

Suasana semakin semarak ketika hadiah diumumkan secara bertahap. Berbagai hadiah mulai dari Annual Pass, voucher belanja, tabungan, voucher menginap di Putri Duyung Ancol hingga logam mulia berhasil menarik antusiasme para pengunjung.

Puncak kemeriahan terjadi saat pembawa acara mengumumkan hadiah utama berupa satu unit mobil listrik. Ribuan pengunjung serentak mengikuti hitung mundur sebelum nama pemenang ditampilkan di layar utama, menciptakan suasana penuh kegembiraan.

Informasi resmi mengenai para pemenang dapat diakses melalui website, aplikasi Ancol Points, maupun media sosial resmi Ancol.

Program Ancol Points sendiri merupakan bagian dari upaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dalam menghadirkan pengalaman rekreasi yang lebih bernilai. Setiap transaksi yang dilakukan pelanggan di ekosistem Ancol akan menghasilkan poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah serta memberikan akses terhadap promo, permainan, hingga misi menarik yang memperkaya pengalaman berwisata.

Ke depan, Ancol memastikan akan terus menghadirkan berbagai inovasi, promo, serta aktivitas menarik melalui Ancol Points agar manfaat program loyalitas tersebut dapat dirasakan oleh semakin banyak masyarakat.

Bagi masyarakat yang belum menjadi anggota, Ancol mengajak untuk segera mengunduh aplikasi Ancol Points dan mulai mengumpulkan poin dari setiap transaksi agar dapat menikmati berbagai keuntungan sekaligus berkesempatan mengikuti program undian berikutnya.

(Michael J Manurung)

KPSP Setia Kawan Pasuruan ..... *Halaman 1*

Ketua KPSP Setia Kawan Nongkojajar, Sulistiyanto, mengatakan produksi susu segar yang dikelola koperasi mencapai sekitar 110 ton per hari. Produksi tersebut berasal dari sekitar 12 ribu ekor sapi perah yang dipelihara oleh 11.300 peternak di Kecamatan Tutur dan wilayah sekitarnya.

"Kami saat ini memproduksi sekitar 110 ton susu segar per hari, sementara permintaan dari industri mencapai 160 ton setiap hari," ujar Sulistiyanto saat ditemui di kantornya, Jumat (24/7/2026).

Susu segar hasil produksi KPSP Setia Kawan dipasok ke sedikitnya tujuh perusahaan pengolahan susu berskala nasional, di antaranya PT Indolakto, Cimory Indonesia, Frisian Flag, Diamond Fair, Sari Husada, serta beberapa perusahaan lainnya.

Menurut Sulistiyanto, untuk mengejar kebutuhan pasar, koperasi terus berupaya meningkatkan produktivitas peternakan. Langkah yang dilakukan antara lain memperbaiki manajemen pakan, meningkatkan kualitas pakan ternak, serta menambah populasi sapi perah berproduksi tinggi.

"Harapan kami, dengan produktivitas yang semakin baik dan penambahan populasi sapi, produksi susu juga dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri," katanya.

Selain menjalankan usaha peternakan sapi perah, KPSP Setia Kawan juga mengembangkan unit usaha simpan pinjam serta perdagangan melalui jaringan minimarket yang dikelola koperasi.

Dalam memperkuat daya saing, koperasi ini juga menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan dan koperasi internasional. Di antaranya Arla Foods dari Denmark, perusahaan pakan ternak asal Belanda, serta perusahaan penyedia bibit sapi dari Selandia Baru.

Sulistiyanto menambahkan, peningkatan kualitas susu tidak hanya didukung oleh peternak, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi. KPSP Setia Kawan telah menerapkan sistem digitalisasi di sejumlah pos penampungan susu yang terhubung langsung dengan pusat data koperasi.

"Saat ini kami mendapat dukungan dari pemerintah, swasta, maupun kalangan akademisi dalam penerapan digitalisasi di pos penampungan. Sistem ini membantu menjaga mutu, kualitas, dan pengelolaan produksi susu secara lebih efektif," jelasnya.

Melalui peningkatan produktivitas, kemitraan internasional, dan pemanfaatan teknologi, KPSP Setia Kawan berharap mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat daya saing susu segar asal Kabupaten Pasuruan di pasar nasional.

(Wio)

Satlantas Polres Way Kanan Sosialisasikan ..... *Halaman 1*

bantuan darurat. Masyarakat yang mengalami keadaan darurat, menyaksikan kecelakaan lalu lintas, maupun tindak kejahatan di jalan raya dapat segera menghubungi kepolisian melalui aplikasi tersebut.

"Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh akses layanan kepolisian secara lebih cepat sehingga penanganan di lapangan juga dapat dilakukan secara lebih responsif," ujar AKP Sulkhan.

Ia berharap kehadiran aplikasi Siger Lampung Presisi semakin memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, kondusif, dan responsif.

Selain memperkenalkan aplikasi, petugas juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas. Pengendara diimbau menjadi pelopor keselamatan dengan mematuhi aturan lalu lintas sebagai upaya menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Way Kanan.

(Suhaili)

Tukin TNI Naik ..... *Halaman 1*

menggantikan Perpres Nomor 102 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan penyesuaian indeks dari 70 persen menjadi 90 persen membuat nominal tukin di seluruh kelas jabatan ikut naik.

"Untuk kelas jabatan tertinggi atau kelas 17, tukin menjadi sekitar Rp37,39 juta per bulan," kata Rico, Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan lampiran Perpres Nomor 42 Tahun 2026, tukin kelas jabatan terendah naik dari Rp1,9 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan. Sementara pejabat TNI berpangkat bintang tiga menerima tukin Rp44,87 juta dan bintang empat sebesar Rp48,61 juta per bulan.

Menurut Rico, kenaikan tersebut diberikan setelah hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PANRB menyatakan Kemhan dan TNI memenuhi syarat untuk memperoleh penyesuaian indeks tukin. Selain itu, tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kemhan belum pernah mengalami kenaikan sejak 2018.

"Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas peningkatan kinerja organisasi sekaligus untuk memperkuat motivasi, profesionalisme, dan kesejahteraan prajurit TNI serta pegawai Kemhan," ujarnya.

Ia menambahkan, meningkatnya beban tugas TNI dan Kemhan, mulai dari menjaga kedaulatan negara, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, pembangunan daerah terpencil hingga pengamanan wilayah rawan, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menaikkan tukin.

Pembayaran Dimulai September

Kemhan saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) dan Peraturan Panglima TNI sebagai aturan pelaksana. Setelah regulasi tersebut selesai, besaran hak masing-masing personel akan dihitung dan pembayaran tukin ditargetkan mulai September 2026.

Untuk tahap awal, pembayaran akan menggunakan anggaran belanja pegawai yang tersedia. Jika kebutuhan anggaran melebihi pagu, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

"Apabila masih terdapat kekurangan anggaran setelah dilakukan perhitungan, kebutuhan tambahan akan diajukan kepada Kementerian Keuangan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Rico.

Kemhan: Syarat Sudah Terpenuhi

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana mengatakan usulan kenaikan tukin diajukan setelah Kemhan dan TNI memenuhi sejumlah indikator yang dipersyaratkan pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada kisaran 80–90 poin serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut.

"Itu menjadi dasar kami mengajukan penyesuaian tukin dari 70 persen menjadi 90 persen," ujar Wisnu.

Ia memastikan program efisiensi anggaran pemerintah tidak memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut karena proses pengajuannya telah dilakukan jauh sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan.

Namun, Kemhan masih menghitung total kebutuhan anggaran tambahan akibat kenaikan tukin. Nilai tersebut baru akan diketahui setelah seluruh data personel dan hak masing-masing selesai dihitung.

DPR Dukung, Pengamat Soroti Keadilan Anggaran

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan prajurit merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme TNI dan sistem pertahanan nasional.

Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diiringi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesiapan operasional TNI.

Sementara itu, sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu menjelaskan sumber pendanaan kenaikan tukin di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai kenaikan tukin memang wajar karena belum pernah dilakukan sejak 2018. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan dari kelompok aparatur lain seperti guru dan dosen yang juga menuntut peningkatan kesejahteraan.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi. Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap aparatur negara lainnya.

Hingga berita ini ditulis, Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi mengenai dampak kenaikan tukin TNI dan pegawai Kemhan terhadap kondisi fiskal negara.

(red)

Dugaan Pembalakan Liar ..... *Halaman 1*

pelanggaran hukum.

Selain itu, unggahan tersebut menyebut dugaan kayu hasil aktivitas tersebut akan dibawa keluar dari wilayah Murung Raya serta melibatkan pihak dari luar daerah. Namun, informasi itu masih sebatas klaim di media sosial dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Dugaan praktik pembalakan liar menjadi perhatian karena apabila terbukti terjadi dapat berdampak terhadap kerusakan hutan, hilangnya tutupan vegetasi, terganggunya ekosistem, serta menimbulkan kerugian negara.

Secara hukum, aktivitas penebangan, pengangkutan, maupun perdagangan hasil hutan tanpa izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Jaya Pos meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah, serta instansi kehutanan terkait, untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan secara profesional terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebenaran informasi, memberikan kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di bidang kehutanan.

Hingga berita ini diterbitkan, Jaya Pos belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Murung Raya, Polsek Permata Intan, maupun instansi kehutanan terkait mengenai dugaan aktivitas pembalakan liar tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan akan memperbarui informasi apabila terdapat perkembangan terbaru.

(Mandau)

Pemkab Simalungun Resmikan ..... *Halaman 1*

an Bunda PAUD dapat terus memberikan motivasi dan pembinaan bagi seluruh satuan PAUD di wilayahnya.

Sementara itu, Ny. Darmawati mengatakan keberadaan dua TK Negeri Pembina merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan mudah diakses masyarakat.

"Atas nama Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, saya menyampaikan apresiasi atas hadirnya TK Negeri Pembina sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan terjangkau," ujarnya.

Menurutnya, peresmian sekolah tidak hanya sebatas menghadirkan bangunan baru, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dengan satu tahun pendidikan prasekolah.

Ia menilai pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemampuan bersosialisasi, serta rasa percaya diri anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Ny. Darmawati berharap TK Negeri Pembina menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, ramah anak, dan didukung tenaga pendidik yang profesional serta mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik.

Ia juga mengajak pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

"Kami mengapresiasi dedikasi para guru PAUD yang telah mengabdikan diri mendidik anak-anak. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan tumbuh kembang anak," katanya.

Usai meresmikan TK Negeri Pembina di Kecamatan Dolok Panribuan, rombongan melanjutkan kunjungan ke TK Negeri Pembina Kecamatan Tanah Jawa untuk meresmikan sekolah tersebut sekaligus meninjau fasilitas serta berdialog dengan guru dan orang tua siswa.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Arismen Damanik, para camat, unsur Forkopimcam, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, serta orang tua siswa.

Melalui kehadiran dua TK Negeri Pembina tersebut, Pemkab Simalungun berharap kualitas layanan pendidikan anak usia dini semakin meningkat sehingga mampu mencetak generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Simalungun yang lebih maju.**(Isnani)**

Job Fair Depok 2026 Dibuka 4-5 Agustus, Tersedia 1.000 Lowongan dari 25 Perusahaan

Depok, Jaya Pos

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menggelar Job Fair Kota Depok 2026 yang akan berlangsung pada 4-5 Agustus 2026 di Depok Town Square (Detos). Bursa kerja ini menyediakan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan dari 25 perusahaan" yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengajak masyarakat, khususnya para pencari kerja, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing.

"Kabar gembira untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Job Fair Kota Depok akan digelar pada 4-5 Agustus 2026 di Depok Town Square. Silakan datang dan mengikuti proses pendaftarannya," ujar Supian Suri, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok itu tidak hanya membuka layanan lamaran kerja, tetapi juga menghadirkan proses "walk-in interview" sehingga pelamar dapat langsung mengikuti tahapan rekrutmen dengan perusahaan peserta.

Menurut Supian, mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat proses seleksi sekaligus meningkatkan peluang pencari kerja untuk segera memperoleh pekerjaan.

Walikota Depok H.Supian Suri (foto:Joko Warihnyo)

"Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Datang tepat waktu dan semoga menjadi jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan," katanya.

Ia juga mengingatkan peserta agar mempersiapkan diri sebelum mengikuti bursa kerja, mulai dari melengkapi dokumen lamaran, berpakaian rapi, hingga mempersiapkan diri menghadapi sesi wawancara.

Job Fair Kota Depok 2026 merupakan salah satu upaya Pemkot Depok mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan tenaga kerja lokal. Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Depok.

Dengan lebih dari 1.000 lowongan dari berbagai sektor industri, Job Fair Kota Depok 2026 diharapkan menjadi peluang bagi para pencari kerja untuk memulai karier sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kesempatan kerja.

(Joko Warihnyo)

Tim Gabungan Pemkab Simalungun Berhasil Evakuasi Enam Warga Terjebak Banjir di Serbalawan

Simalungun, Jaya Pos

Curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kabupaten Simalungun beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Sikkam meluap, merendam kawasan Pasar Bawah, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Sumatera Utara, Kamis malam (30/7/2026).

Air naik begitu cepat sehingga puluhan rumah warga tergenang sekitar 3 meter, tak terkecuali fasilitas umum dan sarana pendidikan di sekitarnya. Luapan ini bahkan membuat enam warga tak sempat menyelamatkan diri dan terpaksa mengungsi ke atap rumah demi menghindari arus air yang terus meninggi.

Mendapat laporan kejadian, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, segera turun ke lokasi bersama personel.

Di tempat, Budimana menerima informasi bahwa enam warga terjebak dan bertahan di atap rumah. Langkah cepat pun diambil dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari personel TNI Koramil Serbalawan, Polri Polsek Serbalawan, jajaran BPBD, pemerintah kecamatan, serta warga setempat. Menggunakan perahu karet, tim segera meluncur menembus arus air untuk melakukan misi penyelamatan.

Berkat ketangkasan dan kerja sama tim yang solid, proses evakuasi berjalan lancar. Keenam warga yang sudah terjebak sekitar dua jam lebih berhasil diselamatkan dengan selamat, lalu langsung dibawa kerumah warga guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Salah satu rumah Warga Banjir akibat Banjir bandang , TNI POLRI, langsung Turun Tangan , Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD kabupaten Simalungun arahkan semua Anggota. (Foto/Isnani)

Berdasarkan pendataan sementara, banjir telah merendam puluhan rumah warga, satu masjid, satu musala, serta dua sekolah, Sekolah Jamiatul Wasliyah dan SD Muhammadiyah Bandar Selamat.

Sebagai langkah tanggap darurat, Pemkab Simalungun melalui BPBD telah mendirikan tenda siaga, serta menyiagakan personel dan armada untuk mendukung evakuasi dan penanganan di lapangan.

Budiman juga mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan rawan banjir, untuk tetap waspada karena potensi hujan deras masih mungkin terjadi dalam waktu dekat.

"Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan instansi terkait terus memantau situasi, menanganinya, serta mempercepat pemulihan agar kondisi segera kembali normal," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, didampingi Lurah Serbawalan Lasma Damanik dan Kapolsek Dolok Batu Nanggar, IPTU Rido V. Pakpahan menjelaskan bahwa banjir datang dengan sangat mendadak.

Menurutnya, Banjir ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang disertai kiriman air dari arah Kecamatan Tapian Dolok, khususnya kawasan Perkebunan Bridgestone, yang membuat debit Sungai Sikkam melonjak tajam.

Selain merusak pemukiman, arus kuat juga menghanyutkan empat unit sepeda motor, tiga di Simpang Pondok Batu Silangit, Jalan Medan–Siantar, dan satu di sekitar Jembatan Pondok Pelita. Hingga kini dua unit sudah ditemukan, sementara dua lainnya masih dicari karena arus sungai yang terus mengalir deras.

(Isnani)

Disdikbud Mukomuko Kembalikan Siswa Baru ke Sekolah Sesuai Zonasi

Mukomuko, Jaya Pos

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko mengembalikan sejumlah siswa baru ke sekolah yang sesuai dengan wilayah domisilinya setelah ditemukan banyak pendaftaran yang tidak sesuai ketentuan zonasi.

Kebijakan tersebut diterapkan karena masih banyak orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah di luar wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data Dapodik Disdikbud Mukomuko, kondisi itu terjadi di sejumlah sekolah dasar, di antaranya SDN 01 dan SDN 03 Mukomuko. Siswa yang mendaftar di SDN 01 Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, misalnya, seharusnya terdaftar di SDN 10 Kelurahan Koto Jaya sesuai wilayah domisilinya.

Kantor Dinas Disdikbud Mukomuko.(dok Japri)

Kondisi serupa juga terjadi di SDN 07 Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko. Banyak orang tua justru mendaftarkan anaknya ke SDN 03 Kelurahan Bandaratu sehingga jumlah calon peserta didik di SDN 07 berkurang drastis.

Kepala Disdikbud Kabupaten Mukomuko Arni Gusnita melalui Kabid Kesiswaan, Slamet, mengatakan seluruh siswa yang mendaftar di luar zonasi akan dikembalikan ke sekolah sesuai aturan yang berlaku.

"Sesuai aturan yang telah ditetapkan, semua anak yang mendaftar di sekolah di luar zonasi akan dikembalikan ke sekolah sesuai zona masing-masing," ujar Slamet.

Meski demikian, Slamet menjelaskan ada sejumlah pengecualian yang menjadi pertimbangan. Di antaranya jika orang tua siswa merupakan tenaga pendidik di sekolah tujuan, siswa berasal dari keluarga penerima bantuan sosial, atau telah berpindah domisili sesuai ketentuan.

Ia juga menilai pihak sekolah seharusnya sejak awal menolak pendaftaran yang tidak sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan pada proses penerimaan peserta didik.

"Seharusnya sekolah sudah memahami aturan tersebut sejak awal sehingga tidak menerima pendaftaran yang tidak sesuai zonasi. Pengembalian siswa ini dilakukan mengacu pada aturan yang berlaku," tegasnya.

Slamet menambahkan, apabila kejadian serupa kembali ditemukan, pihak sekolah diminta segera melaporkannya selama masa sanggah agar dapat ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. **(Jpr)**

Polda Banten Lakukan Pengamanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI

Tangerang, Jaya Pos

Polda Banten melaksanakan pengamanan secara maksimal dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke PT Yifang CME dan PT Elesun di kawasan eks PT Freetrend, Kampung Kalanturan, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Kamis (30/07).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka meninjau proses pembuatan rangka dan perakitan motor listrik sebagai bagian dari penguatan sektor industri kendaraan listrik nasional. Pengamanan dipimpin oleh jajaran Polda Banten bersama Polresta Tangerang dengan melibatkan unsur TNI serta instansi terkait.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Owner PT Yifang Eddy Chan, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, Wakil Gubernur Banten Dr. H. Achmad Dimyati Natakusumah, Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Faizal Rizal, Bupati Tangerang Drs. Moch. Maesyal Rasyid, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M. Indra Waspada, Waka Polresta Tangerang Kombes Pol Christian Aer, Kabid Propam Polda Banten Kombes Pol Murwoto, Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Wirasto Adi Nugroho, serta pejabat utama Polda Banten, Polresta Tangerang, dan unsur Forkopimda lainnya.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, saat memantau lokasi yang akan dikunjungi Wapres. Foto(Ist)

Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan rombongan Wakil Presiden RI yang melintas Gerbang Tol Balaraja Barat pada pukul 09.57 WIB dan tiba di lokasi pada pukul 10.05 WIB dalam keadaan aman dan lancar. Selanjutnya, Wakil Presiden meninjau area operasional PT Elesun untuk melihat langsung proses produksi, aktivitas perusahaan, serta menerima paparan dari pihak perusahaan mengenai proses pembuatan rangka dan perakitan motor listrik.

Dalam pelaksanaan pengamanan, Polda Banten dan Polresta Tangerang menerjunkan personel gabungan yang terdiri dari 131 personel Polri, 30 personel Yon 10/ABC, 40 personel Yon TP 942, serta 80 personel Kodim 0510/Tigaraksa.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan sinergi antara Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan seluruh agenda kunjungan Wakil Presiden berjalan aman dan lancar. **(Yan)**

Pemkab Pasuruan Bersama KUTT Suka Makmur Gelar Sarasehan Hari Koperasi ke-79

Acara Sarasehan Hari Koperasi ke-79. (Foto: dok)

Pasuruan, Jaya Pos

Memperingati Hari Koperasi ke-79, Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama KUTT Suka Makmur menggelar Sarasehan Penguatan Koperasi Susu Bagi Kedaulatan Gizi Nasional. Kegiatan berlangsung di KUTT Suka Makmur, Jl. Semambung No. 17, Desa Sumber Agung, Kecamatan Grati, Rabu 12:30 WIB.

Sarasehan ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, dan para pelaku koperasi untuk memperkuat peran koperasi susu dalam rantai pangan nasional. Sekaligus menjadi langkah nyata mendukung program pemerintah pusat dalam pemenuhan gizi dan penurunan stunting.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Koperasi Koko Haryano yang mewakili Menteri Koperasi. Dari jajaran Pemkab Pasuruan hadir Wakil Bupati H. Shobih Asrori, Sekda Yuda Triwidya Sasongko, dan Kadis Koperasi Taufiqul Ghoni, S.E., M.Si.

Unsur Forkopimda juga tampak lengkap. Hadir Wakil Ketua DPRD Pasuruan Rias Yudikari Drastika, S.H., Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono, S.H., S.I.K., M.H., Dandim 0819 Letkol Inf Boga Bramiko, M.Han.

Dari unsur hukum hadir Ketua Pengadilan Negeri Bangil Wahyu Iswari, S.H., M.Kn. dan Kajari Bangil Rutandi Gustawirya, S.H., M.H.

Turut hadir Ketua KUTT Suka Makmur Evi Zainal Abidin, pengurus GKSI, Camat Grati, kepala desa se-Kecamatan Grati, penyuluh peternakan, serta ratusan anggota koperasi dan peternak sapi perah.

Dalam sambutannya, Ketua KUTT Suka Makmur Evi Zainal Abidin memaparkan data penting tentang posisi Jawa Timur di industri persusuan nasional.

"Jawa Timur adalah lumbung susu segar Indonesia. Kita menyumbang 60% dari seluruh produksi susu nasional. Dan dari 60% itu, 80% berada di bawah naungan GKSI yang dipimpin oleh Bapak H. Nur Kayin," ujar Evi. Lebih lanjut, Evi menegaskan bahwa eksistensi koperasi susu jauh melampaui fungsi ekonomi semata.

"Koperasi bukan hanya tempat menjual susu. Koperasi adalah rumah besar bagi para peternak. Di sinilah harga diperjuangkan agar tidak dipermainkan tengkulak. Di sinilah kualitas dijaga agar susu kita bisa bersaing. Dan di sinilah masa depan anak-anak peternak kita ditentukan.

Wakil Bupati Pasuruan H. Shobih Asrori dalam arahannya menyebut Kabupaten Pasuruan memiliki potensi luar biasa di sektor peternakan sapi perah. Jumlah populasi sapi perah dan produksi susu di Grati, Puspo, dan Tutur menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.

"Koperasi susu tidak hanya berperan sebagai wadah penyerap hasil perah para peternak lokal. Lebih dari itu, koperasi adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan yang menggerakkan roda perekonomian desa. Dari sinilah kesejahteraan itu dimulai," kata Wabup.

Untuk menjawab tantangan ke depan, Wabup menyampaikan 3 harapan besar Pemkab Pasuruan:

1. Penguatan dan Modernisasi Koperasi

"Kami berharap koperasi susu di Kabupaten Pasuruan terus bertransformasi. Mulai dari tata kelola manajemen yang profesional, pemanfaatan teknologi pemerahan dan pendingin yang modern, pengolahan produk turunan susu, hingga digitalisasi rantai pasok. Koperasi harus melek data dan melek pasar agar tidak tertinggal zaman."

2. Dukungan Penuh terhadap Program Gizi Nasional

"Pemerintah pusat sedang gencar dengan program Makan Bergizi Gratis dan pemenuhan protein hewani. Nah, susu adalah salah satu jawabannya. Kami ingin produksi susu Pasuruan menjadi bagian dari solusi nasional untuk pemenuhan gizi masyarakat."

3. Penopang Utama Pencegahan Stunting

"Target kita jelas. Kita ingin hasil produksi susu di Pasuruan menjadi penopang utama program pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi ini adalah investasi jangka panjang. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang sehat, kuat, cerdas dan berdaya saing ", pungkas Wabup.

Stap Ahli kementerian Koperasi Koko Haryono mengapresiasi langkah pemkab Pasuruan dan KUTT suka makmur. Ia menyebut koperasi susu adalah model ideal koperasi yg langsung menyentuh kesejateraan anggota. **(Wio)**

MARI BERSAMA PERANGI NARKOBA

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

JAPOS.CO
Email:japos@yahoo.com
TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 852 TAHUN XIX, 3 - 9 AGUSTUS 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

62 Anak Penyandang Disabilitas di Simalungun Terima Kursi Roda Adaptif pada Peringatan HAN 2026

Simalungun, Jaya Pos

Sebanyak 62 anak penyandang disabilitas di Kabupaten Simalungun menerima bantuan kursi roda adaptif pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Bantuan tersebut diberikan kepada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), khususnya penyandang cerebral palsy.

Penyerahan bantuan berlangsung di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (27/7/2026). Suasana haru mewarnai kegiatan saat anak-anak bersama orang tua mereka menerima kursi roda yang diharapkan dapat menunjang aktivitas sehari-hari.

Bantuan diserahkan oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, didampingi Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, unsur Forkopimda, serta Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, mengatakan 62 kursi roda yang diterima Kabupaten Simalungun merupakan bagian dari 350 unit yang didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Menurutnya, bantuan tersebut berasal dari donasi Wheelchairs For Kids Australia dan Global Village Foundation Bali kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program itu menargetkan penyaluran hingga 1.000 kursi roda adaptif bagi anak penyandang disabilitas di Sumatera Utara.

"Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas, kemandirian, serta akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," ujar Dwi Endah.

Perwakilan Global Village Foundation Bali, Andy Bracey, mengatakan setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, bermain, dan berkembang tanpa memandang kondisi fisik.

Ia menjelaskan, kursi roda adaptif dirancang untuk membantu mobilitas sekaligus mendukung postur tubuh anak. Sejak 2021, organisasinya telah menyalurkan hampir 5.000 kursi roda di Indonesia.

"Kebutuhan masih sangat besar. Kami berkomitmen terus mendukung anak-anak penyandang disabilitas di Sumatera Utara karena setiap anak memiliki masa depan yang berharga," katanya.

▸▸Halaman 11

Bupati Simalungun, berikan bantuan kursi roda kepada masyarakat penyandang cacat.(dok hms)

Perumahan Nelayan Asri Deli Serdang Direvitalisasi
Hunian Relokasi untuk Nelayan Disiapkan Gratis

Pantai Labu, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merevitalisasi Perumahan Nelayan Asri di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu. Program yang diresmikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, Rabu (29/7/2026), itu menjadi bagian dari penataan kawasan pesisir sekaligus menyiapkan hunian relokasi bagi nelayan yang masih tinggal di bantaran sungai dan pesisir pantai.

Perumahan Nelayan Asri yang dibangun pada 2007 memiliki 60 unit rumah yang telah dihuni masyarakat nelayan. Melalui program revitalisasi,

▸▸ Halaman 11

Revitalisasi tersebut diresmikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, Rabu (29/7/2026)(dok hms)

Bea Cukai Bali Nusra Musnahkan Barang Ilegal Rp11,2 Miliar, Negara Selamatkan Rp4,4 Miliar

Jakarta, Jaya Pos

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai dengan total nilai lebih dari Rp11,2 miliar. Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan penerimaan negara.

Kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan pada Kamis (23/7/2026) di Bali itu merupakan tindak

▸▸ Halaman 11

Bea Cukai Sita dan Musnahkan Jutaan Rokok, Vape hingga Kosmetik Ilegal. (Foto: Dokumentasi)

Mulai 1 Agustus 2026, Jakarta Terapkan Sistem Pilah-Angkut-Olah Sampah, Residu Saja Dikirim ke Bantargebang

Jakarta, Jaya Pos

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan sistem baru pengelolaan sampah berbasis pilah-angkut-olah pada 1 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, sampah tidak lagi langsung dibuang ke TPST Bantargebang, melainkan dipilah dan diolah sejak dari sumber. Hanya sampah residu yang tidak dapat diolah yang akan dikirim ke Bantargebang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut merupakan perubahan mendasar dari sistem lama yang selama ini menggunakan pola kumpul-angkut-buang.

"Setelah terbit Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, terjadi perubahan mendasar. Kalau dulu kumpul-angkut-buang, sekarang menjadi pilah-angkut-olah. Mulai 1 Agustus 2026, sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang diarahkan hanya berupa residu. Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk menghentikan praktik open dumping secara

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).(dok hms)

bertahap menuju target zero open dumping pada 2029," kata Pramono saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Menurut Pramono, transformasi pengelolaan sampah harus didukung seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat diminta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah, sementara kawasan komersial, perkantoran, hotel, restoran, dan kafe (Horeka) diwajibkan mengelola sampah yang dihasilkannya secara mandiri.

Sebagai bagian dari masa transisi sebelum fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refuse-Derived Fuel (RDF) beroperasi penuh, Pemprov DKI

▸▸ Halaman 11

Pergantian Kapolres Trenggalek Disambut Tradisi Pedang dan Payung Pora

Trenggalek, Jaya Pos

Pergantian pucuk pimpinan Polres Trenggalek disambut dengan tradisi penyambutan dan pelepasan dihalaman Mapolres. Meski sederhana, seremonial pun berlangsung penuh haru sekaligus sukacita.

Kedatangan Kapolres Trenggalek yang baru AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya didampingi istri disongsong dengan upacara pedang pora. Diiringi pula lantunan selawat yang dibawakan oleh tim hadrah Polres Trenggalek pada Rabu 29 Juli 2026.

Selaku pejabat lama, AKBP Ridwan Maliki pun menyambut langsung di lobi Mapolres sekaligus memperkenalkan jajaran. Satu persatu mulai dari pejabat utama, para kapolsek maupun perwira staf lain yang dilanjutkan laporan kesatuan di Aula Tatag Trawang Tungga.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Ridwan memaparkan situasi dan kondisi wilayah, upaya yang dilakukan hingga berbagai inovasi-inovasi. Berikut juga, progres yang telah tergelar termasuk

Tradisi Pedang dan Payung Pora iringi pergantian Kapolres Trenggalek. Rabu 27 Juli 2026. (foto: ist)

diantaranya mengenai efektivitas pengelolaan Kamtibmas.

Seusainya, dilaksanakan apel kesatuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Polres dan Polsek jajaran yang dipimpin oleh AKBP Ridwan selaku Kapolres lama dan AKBP Rizky sebagai Kapolres Trenggalek yang baru.

"Kepada seluruh anggota sekalian disampaikan terimakasih atas dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama ini. Berbagai capaian prestasi merupakan hasil kerja bersama. Maka, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan," ungkap AKBP Ridwan.

Menurut dia, selama 15 bulan menjabat sebagai Kapolres Trenggalek telah memiliki kesan cukup mendalam. Lingkungan dan alam yang indah didukung karakter kultural masyarakat Jawa Matara-

▸▸ Halaman 11

KKN Mahasiswa UNHAS foto bersama warga.

Dukung Pencegahan Stunting, Mahasiswa KKN-PK Unhas Edukasi Keamanan Protein Hewani untuk MPASI di Sidrap

Sidrap, Jaya Pos

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kesehatan Angkatan 69 Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar edukasi bertajuk "MPASI Sehat Dimulai dari Protein Hewani: Edukasi Veteriner tentang Pemilihan dan Penyimpanan Pangan Asal Hewan untuk Pencegahan Stunting" di Posyandu Asri, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan ini menyasar ibu hamil dan ibu yang memiliki anak bawah dua tahun (baduta) sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan asal hewan dalam penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang aman dan bergizi.

Program tersebut turut didampingi Bidan Puskesmas Pembantu Kelurahan Rijang Pittu. Edukasi diberikan karena masih diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait cara memilih dan menyimpan bahan pangan asal hewan secara benar agar kualitas gizinya tetap terjaga.

Mahasiswi KKN dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Program Studi Kedokteran Hewan, Anggriani Prasiwi, menjelaskan bahwa protein hewani merupakan salah satu sumber gizi penting dalam mendukung tumbuh

▸▸Halaman 11

Lansia Mendapat Perhatian Serius

Pemkab Simalungun Terus Berupaya Dekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pemkab Simalungun, dekatkan pelayanan publik, cepat dan Tepat Sasaran langsung ke tengah masyarakat. (Foto/Humas)

Simalungun, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau, cepat, dan tepat sasaran langsung ke tengah masyarakat.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Pelayanan Publik Terpadu yang digelar di Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kamis (30/7/2026), dan ditinjau langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih beserta pengurus, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Yulince Mixnon Andreas Simamora, Camat Sidamanik Juliana F. Simarmata bersama jajaran Forkopimca, para Lurah dan Pangulu, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata semangat pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat kerja sama antar instansi guna menghadirkan layanan prima, merata, dan berkualitas hingga ke pelosok nagori.

Sejak pagi, antusiasme masyarakat sudah terlihat sangat nyata, ratusan warga berbondong-bondong memadati lokasi guna memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan secara gratis. Mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, BPJS kesehatan, keluarga berencana, bantuan sosial, hingga pasar murah, semuanya disambut dengan penuh sukacita dan semangat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, serta perubahan Kartu Keluarga. Sementara itu, Dinas Kesehatan menghadirkan pemeriksaan kesehatan lengkap beserta pemberian obat secara cuma-cuma.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan pelayanan sekaligus edukasi program KB. Kepada warga yang membutuhkan, terutama lansia dan keluarga kurang mampu Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako.

Kehadiran pasar murah pun sangat diminati warga. Pemerintah menyediakan beras SPHP sebanyak satu ton dijual seharga Rp58.000 per karung, minyak goreng 100 liter @Rp16.000 per liter, serta 1.500 butir telur ayam dengan harga Rp1.800 per butir—sangat membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Selain menghadirkan pelayanan langsung, Pemkab Simalungun juga menyalurkan anggaran pembangunan di Kecamatan Sidamanik. Di bidang infrastruktur, dilaksanakan rekonstruksi Jalan Manik Maraja sepanjang 395 meter senilai Rp1 miliar, rekonstruksi jalan di Huta Siborong-Borong (Nagori Bahal Gajah) sepanjang 64 meter senilai Rp150 juta, serta perbaikan jalan di Huta Dipar Hataran (Nagori Ambarisan) sepanjang 62 meter juga senilai Rp150 juta.

Sektor pertanian pun mendapat perhatian besar. Pemkab Simalungun melakukan rehabilitasi jaringan irigasi DI Manik Rejo (melayani 90 hektare lahan pertanian) dengan anggaran Rp.2 miliar dan DI Ambarisan (100 hektare) senilai Rp.1 miliar yang kini mulai dikerjakan. Dua unit hand traktor roda dua diserahkan masing-masing 1 unit untuk Nagori Sarimatondang dan Nagori Tigabolon guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Masih di sektor pertanian, Pemkab Simalungun juga melaksanakan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani sepanjang 320 meter di Nagori Tigabolon (Rp.420,8 juta) dan 145 meter di Nagori Ambarisan (Rp190,675 juta). Tak ketinggalan, di bidang kesehatan dilakukan revitalisasi Puskesmas Pembantu Manik Hataran demi layanan yang lebih baik.

Beliau juga menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat lanjut usia (lansia). Dimana warga yang memasuki usia 85 tahun ke atas akan mendapatkan hadiah khusus dari Pemkab Simalungun.

Saat meninjau lokasi pelayanan, Bupati menemukan adanya lansia yang tinggal sendiri namun belum tersentuh bantuan, sehingga langsung memerintahkan dinas terkait segera mendata dan menyalurkan bantuan kepada yang berhak tanpa terkecuali. Program Sekolah Lansia pun diminta segera dikembangkan hingga ke nagori-nagori agar warga lanjut usia tetap sehat, mandiri, dan bahagia.

Menyikapi harapan masyarakat akan pembangunan, Bupati menjelaskan pembangunan akan dilakukan secara bertahap: "Kami tetap berkomitmen membangun infrastruktur jalan. Namun Kabupaten Simalungun memiliki 386 nagori dan 17 kelurahan sehingga seluruh pembangunan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Kami berharap masyarakat tetap bersabar dan terus mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan,"ujar Bupati.

Camat Sidamanik Juliana F. Simarmata bersama para Pangulu menyampaikan terima kasih yang mendalam atas perhatian pemerintah: "Kehadiran Bapak Bupati bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan pelayanan benar-benar hadir di tengah-tengah warga."

Sementara itu, Ketua TP PKK Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat peran PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar di nagori.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan berupa paket sembako, alat pertanian, serta alat kesehatan, kursi roda. Kemudian disalurkan santunan beasiswa dan JKM. Semua itu menjadi bukti bahwa Pemkab Simalungun terus hadir, bekerja, melayani, dan peduli hingga ke pelosok nagori, untuk mewujudkan pelayanan yang dekat, pembangunan yang merata, serta kesejahteraan bagi seluruh warga Simalungun. **(Erwinsah Sinaga)**

Polsek Binjai Kembali Grebek Sarang Narkoba Di Tandem Hilir

Binjai, Jaya Pos

Bentuk komitmen terhadap pemberantasan Narkoba, Polsek Binjai kembali melakukan Grebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Tandem Hilir-1 Dusun-V Gang Mangga Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas di lokasi barak narkoba. Kemudian Kapolsek Binjai AKP Siti Aisyah, M.Pd., memimpin untuk melakukan penggrebekan terhadap barak narkoba tersebut.

Setelah Kapolsek Binjai beserta anggotanya tiba di TKP, barak tersebut tidak ada aktivitas, disinyalir sudah bocor terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyisiran diseputaran lokasi barak sehingga ditemukan adanya "3 (tiga) buah bong yang digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu".

"Selanjutnya Kapolsek Binjaibersama anggotanya melakukan pembongkaran dan pemusnahan dengan cara dibakar terhadap barak narkoba yang meresahkan warga masyarakat., pungkas AKP Siti Aisyah,

Polsek Binjai gerebek barak narkoba Tandem Hilir I, Dusun V, Gang Mangga. (foto/ humas Polres Binjai)

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., tetap mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110, keberhasilan pengungkapan kasus narkoba ini diharapkan mampu memberikan rasa aman & nyaman bagi masyarakat. Kami tetap berkomitmen untuk brantas peredaran narkoba di wilkum Polres Binjai. tegas Kapolres AKBP Bimo.

(Fatimah)

Warga Payah Kumang Datangi Pangkalan LPG 3 Kg, Tuntut Pengembalian 200 Tabung dan Uang Deposit

Ketapang, Jaya Pos

Puluhan warga Desa Payah Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendatangi Pangkalan LPG 3 kilogram milik Susan Kamawati di Jalan Mayjen Sutoyo RT 016 RW 003. Mereka menuntut pengembalian sekitar 200 tabung LPG kosong beserta uang deposit yang diduga dibawa kabur seorang karyawan pangkalan.

Aksi warga dipicu dugaan penggelapan tabung LPG 3 kilogram dan uang deposit yang terjadi sejak 20 Juli 2026. Warga mengaku telah menyerahkan tabung kosong kepada seorang karyawan pangkalan bernama Herman setelah dijanjikan kupon jatah gas bulanan.

Menurut keterangan warga, sekitar 200 tabung LPG kosong diserahkan kepada Herman. Selain itu, warga juga diminta membayar uang deposit sebesar Rp25 ribu untuk setiap tabung. Total dana yang terkumpul disebut mencapai sekitar Rp11 juta.

Namun hingga akhir Juli 2026, tabung LPG maupun uang deposit tersebut belum dikembalikan. Herman juga disebut sudah tidak diketahui keberadaannya.

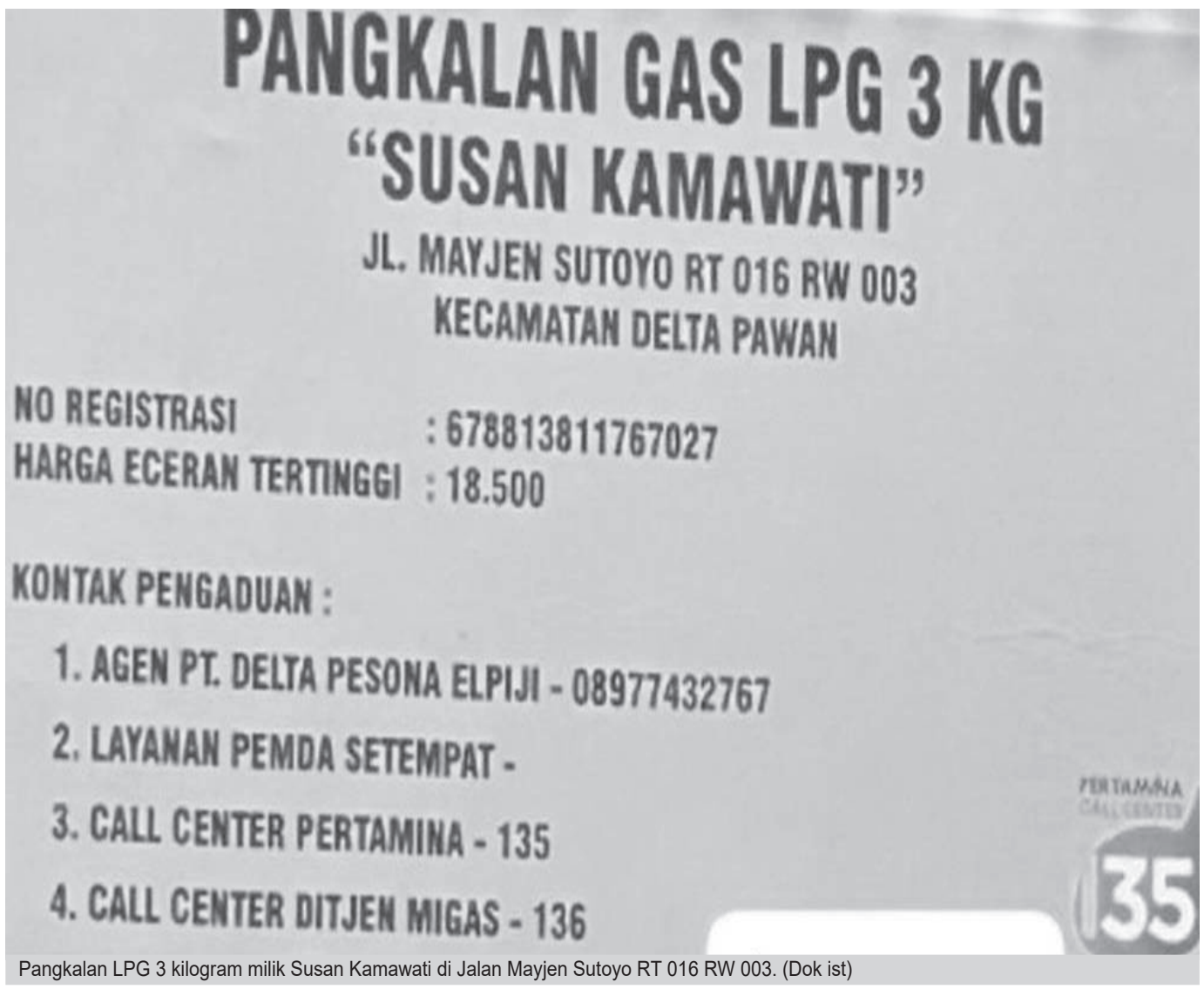

Pangkalan LPG 3 kilogram milik Susan Kamawati di Jalan Mayjen Sutoyo RT 016 RW 003. (Dok ist)

"Ini merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Tetapi tabung gas kosong kami justru hilang. Kalau dihitung, jumlahnya lebih dari 200 tabung, ditambah uang kami mencapai belasan juta rupiah," ujar salah seorang warga.

Bagi warga, kerugian tersebut cukup memberatkan karena LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.500 per tabung.

Pangkalan LPG dengan nomor registrasi 678813811767027 tersebut berada di bawah naungan agen penyalur PT Delta Pesona Elpiji. Saat warga mendatangi lokasi untuk meminta penjelasan, mereka mengaku belum memperoleh kepastian mengenai pengembalian tabung maupun uang deposit.

"Kalau tidak ada penyelesaian, kami akan membawa persoalan ini ke Polres Ketapang," tegas perwakilan warga.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, tim media telah meminta konfirmasi kepada pihak pangkalan. Perwakilan Susan Kamawati membenarkan bahwa Herman merupakan karyawan di pangkalan tersebut. Pihak pangkalan juga menyatakan Herman saat ini telah meninggalkan pekerjaannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Meski demikian, pihak pangkalan menyebut dugaan perbuatan tersebut merupakan tindakan pribadi Herman. Sementara itu, warga menilai pengelola pangkalan tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan yang dialami para pelanggan.

Warga berencana melaporkan dugaan penggelapan dan penipuan tersebut ke Satreskrim Polres Ketapang. Mereka juga meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap agen maupun pangkalan penyalur LPG bersubsidi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.**(Agustinus)**

PKS Depok Sebut PSEL Solusi Atasi Sampah Tanpa Bebani APBD

Depok, Jaya Pos

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), menilai kerja sama pengelolaan sampah melalui skema "Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL)" menjadi solusi paling realistis untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Depok.

Menurut HBS, selain mampu mengurangi persoalan sampah yang semakin mendesak, sistem PSEL juga dinilai lebih aman karena tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan HBS usai pembahasan Komisi C DPRD Kota Depok bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa hingga saat ini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang mampu membiayai biaya pengolahan sampah atau tipping fee secara mandiri.

"Daerah yang menjalankan skema serupa pada akhirnya tetap membutuhkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Jika seluruh biaya dibebankan ke daerah, tentu akan menjadi tekanan bagi APBD Depok," ujar HBS, Kamis (30/7/2026).

Komisi C DPRD Kota Depok kemudian mendalami rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Bogor terkait pengoperasian PSEL Batch II di kawasan Kayumanis yang ditargetkan beroperasi pada 2027–2028.

H.Bambang Sutopo (HBS) Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS. (Foto/Joko)

Sebagai bagian dari pendalaman tersebut, Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada 21 Juli 2026 untuk mempelajari aspek teknis, mekanisme pelaksanaan, serta pola kerja sama pengelolaan sampah.

"Kerja sama ini menjadi pilihan yang relatif aman karena tidak membebani keuangan daerah. Sampah yang selama ini menjadi masalah justru dapat diolah menjadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomi," kata HBS.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS itu menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh tahapan proyek, mulai dari regulasi, teknologi yang digunakan, skema pembiayaan, hingga aspek pengawasan lingkungan.

Menurutnya, indikator kota maju bukan hanya dilihat dari jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi dari kemampuan pemerintah mengelola sampah secara modern dan berkelanjutan.

"Kota yang maju bukan berarti kota yang menghasilkan sedikit sampah, tetapi kota yang mampu mengelola sampah dengan baik dan mengubahnya menjadi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Jika terealisasi, fasilitas PSEL tersebut diproyeksikan mampu mengolah sekitar 700 ton sampah per hari dari Kota Depok menjadi energi listrik. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat mengurangi beban TPA Cipayung yang saat ini menerima sekitar 1.300 ton sampah per hari dengan ketinggian timbunan mencapai 20 hingga 30 meter.

"Pengelolaan sampah modern membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar Depok menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bintang Sakera Abadi (BSA) pada Desember 2025 terkait rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern di kawasan TPA Cipayung.

Dalam rencana awal, fasilitas tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari. Namun, dokumen MoU tersebut masih sebatas kesepakatan awal terkait pemanfaatan lahan dan belum mengatur kewajiban penggunaan APBD, besaran tipping fee, maupun nilai investasi secara resmi.

Dengan demikian, kerja sama tersebut belum menimbulkan kewajiban finansial bagi Pemerintah Kota Depok.

(Joko Warihnyo)

Kepengurusan PSSI Kota Depok Diperpanjang hingga Oktober 2026, Fokus Persiapan Porprov Jabar

Meiyadi Rakasiwi Ketua PSSI Kota Depok (Foto:Joko Warihnyo)

Depok, Jaya Pos

Kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Depok resmi diperpanjang hingga Oktober 2026. Perpanjangan masa bakti tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus memastikan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 berjalan maksimal.

Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PSSI Provinsi Jawa Barat, M. Jailani Syaputra, kepada Ketua PSSI Kota Depok, Meiyadi Rakasiwi.

Jailani mengatakan, masa kepengurusan PSSI Kota Depok sebelumnya berakhir pada 23 Juli 2026. Namun, PSSI Jawa Barat memberikan perpanjangan selama tiga bulan hingga Oktober 2026 demi menjaga stabilitas organisasi dan keberlanjutan program pembinaan sepak bola di Kota Depok.

"Perpanjangan ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan dan persiapan menghadapi agenda olahraga daerah dapat berlangsung dengan baik," ujar Jailani.

Sementara itu, Ketua PSSI Kota Depok, Meiyadi Rakasiwi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada dirinya bersama jajaran pengurus.

Menurut Meiyadi, perpanjangan SK tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembinaan sepak bola di Kota Depok, terutama dalam menghadapi Porprov XV Jawa Barat 2026.

"Perpanjangan SK ini menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih baik. Kami berkomitmen memperkuat pembinaan usia dini, meningkatkan kualitas kompetisi, serta mempersiapkan tim terbaik untuk Porprov XV Jawa Barat 2026," kata Meiyadi, Rabu (29/7/2026).

Ia menambahkan, masa perpanjangan tiga bulan akan dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi organisasi serta menyempurnakan program kerja yang telah disusun.

Meiyadi juga memastikan koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok terus diperkuat. Perpanjangan kepengurusan tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Umum KONI Kota Depok.

"Kami berterima kasih atas dukungan KONI Kota Depok. Dengan kerja sama seluruh pihak, kami optimistis sepak bola Depok dapat memberikan hasil terbaik di Porprov XV Jawa Barat 2026," ujarnya.

Ketua Umum KONI Kota Depok, Herry Suprianto, turut memberikan dukungan atas keberlanjutan kepengurusan PSSI Kota Depok. Ia menilai perpanjangan masa bakti tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam pembinaan atlet.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pak Meiyadi Rakasiwi atas amanah yang kembali diberikan untuk memimpin PSSI Kota Depok," kata Herry.

Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan dibutuhkan untuk menjaga program pembinaan atlet dan memastikan persiapan menuju Porprov XV Jawa Barat 2026 berjalan sesuai target.

"Saat ini fokus utama adalah menghadapi Porprov XV Jawa Barat 2026. Dibutuhkan kerja sama, kekompakan, dan persiapan matang agar target prestasi Kota Depok dapat tercapai," tegasnya.

Herry menambahkan, KONI Kota Depok akan terus mendukung seluruh cabang olahraga, termasuk sepak bola, agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal dan mampu menghasilkan prestasi di tingkat provinsi.

"KONI siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki. Kami berharap sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang mampu menyumbangkan prestasi bagi Kota Depok di Porprov XV Jawa Barat 2026," pungkasnya.

Dengan perpanjangan kepengurusan tersebut, PSSI Kota Depok berharap dapat memperkuat fondasi organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan, serta mempersiapkan tim yang kompetitif untuk menghadapi ajang olahraga terbesar tingkat Provinsi Jawa Barat.

(Joko Warihnyo)

Bupati: Jadi Jalan Putus Mata Rantai Kemiskinan

419 Siswa Ikuti MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang

Para Siswa Ikuti saat mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang. (foto: Dok)

Hamparan Perak, Jaya Pos

Sebanyak 419 siswa resmi mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Deli Serdang, Desa Tandam Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, Kamis (30/7/2026).

Pembukaan MPLS dilakukan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan. Kegiatan ini menandai dimulainya proses belajar mengajar di sekolah berasrama yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Bupati Asri Ludin mengatakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain menyediakan lahan pembangunan sekolah, pemerintah daerah juga aktif mengajak dan meyakinkan para orang tua agar mengizinkan anak-anak mereka bersekolah di Sekolah Rakyat.

"Harapan kami, Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketertinggalan pendidikan. Anak-anak yang belajar di sini memiliki semangat untuk maju dan diharapkan menjadi generasi emas Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Deli Serdang," ujar Asri.

Ia mengaku terharu melihat antusiasme para orang tua yang bangga karena anak-anak mereka kini dapat mengenakan seragam sekolah dan memperoleh kesempatan belajar di lingkungan yang lebih baik. Menurutnya, asrama tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan masa depan peserta didik.

"Kami berharap para orang tua tidak ragu mempercayakan anak-anaknya kepada Sekolah Rakyat. Ini bukan tempat penitipan anak, tetapi tempat membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, dan mampu meraih cita-cita," katanya.

Sebagai bentuk dukungan kepada keluarga peserta didik, Bupati juga menginstruksikan para camat mendata orang tua siswa yang berasal dari kelompok desil 1 dan desil 2. Bagi yang memenuhi persyaratan administrasi kepemilikan lahan, Pemkab Deli Serdang akan mengupayakan bantuan melalui program bedah rumah.

Kepala SRT 1 Deli Serdang, Leni Lasmaria, menjelaskan sekolah tersebut merupakan pengembangan dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) yang sebelumnya beroperasi di Sentra Insyaf Medan, Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru.

Kini, Sekolah Rakyat berkembang menjadi Sekolah Rakyat Terintegrasi yang melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh siswa yang sebelumnya belajar di Kutalimbaru akan dipindahkan dan bergabung di SRT 1 Deli Serdang di Hamparan Perak.

Menurut Leni, seluruh peserta didik menjadi prioritas utama untuk didampingi, dididik, sekaligus dilindungi oleh tenaga pendidik. Kurikulum yang diterapkan sama seperti sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sistem penyetaraan.

"Di Sekolah Rakyat tidak ada perundungan, intoleransi, maupun kekerasan fisik. Kami juga tidak membatasi usia. Anak usia 11 tahun yang baru masuk SD tetap diterima, begitu juga peserta didik berusia hingga 20 tahun akan mengikuti sistem penyetaraan sesuai ketentuan," jelasnya.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang tidak hanya melayani peserta didik dari seluruh wilayah Deli Serdang, tetapi juga menjadi pusat lahirnya sumber daya manusia unggul sekaligus mendorong kemajuan Kecamatan Hamparan Perak.

Leni menambahkan kebutuhan tenaga pendidik terus dipenuhi dan akan kembali bertambah pada September mendatang.

"Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati karena SRT 1 Deli Serdang menjadi Sekolah Rakyat terbesar ketiga di Indonesia. Kami juga memiliki lapangan sepak bola berstandar FIFA yang dapat mendukung pengembangan bakat siswa dan menjadi kebanggaan sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana SRT 1 Deli Serdang, Langgeng Setiawan, menjelaskan kegiatan MPLS diawali dengan konsep open house, yaitu seluruh siswa mulai menempati asrama sekaligus mengenal lingkungan sekolah.

Sebanyak 419 peserta didik berasal dari 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas 60 siswa SD, 90 siswa SMP, 120 siswa SMA, serta 149 siswa angkatan sebelumnya yang berasal dari Sentra Insyaf Kementerian Sosial di Medan.

"Ini adalah rumah kita bersama. Dengan fasilitas yang lengkap di atas lahan seluas tujuh hektare, kami optimistis SRT 1 Deli Serdang mampu menjadi sekolah yang maju dan melahirkan siswa-siswa berprestasi sesuai potensi masing-masing," kata Langgeng.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, para camat, kepala desa, dan seluruh pihak yang telah membantu menjangkau calon peserta didik dari keluarga desil rendah agar memperoleh akses pendidikan yang lebih berkualitas.

Pada pembukaan MPLS, para siswa menampilkan orasi dalam tiga bahasa, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, dan Bahasa Arab sebagai simbol semangat belajar. Mereka juga menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya dan paduan suara.

Kegiatan pembukaan MPLS ditutup dengan penyematan tanda peserta didik oleh Bupati Deli Serdang yang didampingi jajaran Forkopimda Deli Serdang. **(Ramdani)**

Wakapolda Banten Dorong Sinergi Ketahanan Pangan Melalui Panen Raya dan Gerakan Tanam Jagung Hibrida PS-08

Pandeglang, Jaya Pos

Wakapolda Banten Brigjen Pol. Iwan Saktiadi menghadiri kegiatan Panen Raya Padi PS-08 dan Gerakan Tanam Jagung Hibrida PS-08 yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Bela Negara di Blok Cidatu, Kampung Mataram, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Kamis (30/07).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan berkelanjutan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan para petani di Provinsi Banten.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan Panen Raya Padi PS-08 di lahan pertanian seluas 1.500 hektare, yang menjadi bukti keberhasilan pengembangan varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Selain itu, dilakukan pula Gerakan Tanam Jagung Hibrida PS-08 pada lahan seluas 500 hektare sebagai langkah nyata meningkatkan produksi jagung dan memperkuat ketersediaan pangan di wilayah Banten.

Gubernur Banten Andra Soni saat memberikan sambutan. (Foto: Dok)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Banten H. Andra Soni, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto, Kapolres Pandeglang AKBP Dr. Dhyno Indra Setyadi, jajaran Forkopimda, perwakilan Yayasan Bhakti Bela Negara, para tokoh masyarakat, kelompok tani, Brigade Pangan Bhakti Bela Negara, serta tamu undangan lainnya.

Wakapolda Banten Brigjen Pol. Iwan Saktiadi menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Panen raya dan gerakan tanam ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia pertanian, dan masyarakat mampu menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan. Kami dari Polda Banten siap mendukung setiap program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta terwujudnya swasembada pangan nasional sebagaimana menjadi prioritas pemerintah," ujar Iwan Saktiadi.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung berbagai program strategis nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Polda Banten berkomitmen untuk terus mengawal terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif sehingga aktivitas pertanian dapat berjalan dengan baik. Dengan keamanan yang terjaga, para petani dapat meningkatkan produktivitasnya dan bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan," tutup Wakapolda Banten.

Melalui kegiatan Panen Raya Padi dan Gerakan Tanam Jagung Hibrida PS-08 ini, diharapkan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor terus terpelihara sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia yang semakin maju dan berdaulat di bidang pangan. **(Yan)**

Harian JAYA POS Perubahan Menuju Kemajuan
Terbit Setiap Minggu

Diterbitkan Oleh:
PT. Media Cipta Jaya Selaras
SK MENKUM & HAM RI:
Nomor: AHU-19831.40.10.2014
Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337
NPWP No: 70.947.655.0-001.000
SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:
Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003
Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat
Telp: (021) 23095745
e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id
Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:
Drs. John Hotman Malau, M.Si
Wakil Pemimpin Umum:
Leonardus Pasaribu, SH.

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Toni Limbong, SH.
Pemimpin Perusahaan: Febri Oloan Seim Brando, S.Ak
Wakil Pemimpin Redaksi : Anrico Pasaribu, ST., SH.
Sekretaris Redaksi: Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Pahotan Sinaga
Manager Pemasaran/Iklan: Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:
Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu,ST, SH
Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:
A. Ristanto
REDAKTUR:
Dede Rostini
DESAIN GRAFIS/IT:
Agus Wiro
PHOTO GRAPHER
Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Rikkot Manik
Riau: .....
Sumatera Selatan: .....
Bangka Belitung: Yustami AI
Jambi: Kusuma Inrda Wijaya
Sumatera Barat: Zakirman
Banten: Guntur Sihombing
Bengkulu: Japri
DKI Jakarta: Jama Berutu
Lampung: Suhaili
Jawa Tengah: M. Sofi
Jawa Barat: Hendry Hutagalung
Jawa Timur: Wiro Utomo
Sulawesi Selatan: Muh. Hakim
Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi
Sulawesi Tengah Heriyanti
Kalimantan Barat : Suhardi
Kalimantan Timur .....

STAF REDAKSI:
JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung | Bedman Tambunan
LITBANG:
Lamser Limbong
SIRKULASI:
Nelson Hutapea
PENASEHAT HUKUM:
Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:
Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.
ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.
Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka
Rek. No. : 1148-01-000156-30-1
a/n PT Media Cipta Jaya Selaras
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot
Rek. No. : 0379-01-002054-50-7
a/n Toni Limbong
- Bank BCA Cab. Daan Mogot
Rek. No. : 1984084008
a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika
Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang
Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473
(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Dari Abraham Kuyper hingga Danau Toba:

Mencari Pemimpin Na Pinaraja, Bukan Sekadar Penguasa

Foto dokumen Wilmar Eliaser Simandjorang pada waktu menjabat Bupati Samosir. (Foto/dok Wilmar)

Samosir, Jaya Pos

"Tidak ada satu jengkal pun dari seluruh wilayah kehidupan manusia yang tidak berada di bawah kedaulatan Kristus. Sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Kristus menyatakan atas setiap bagian kehidupan: Itu milik-Ku."

Pemikiran tersebut menjadi dasar utama gagasan Abraham Kuyper (1837–1920), tokoh besar asal Belanda yang dikenal sebagai pendeta, jurnalis, pendidik, pendiri Vrije Universiteit Amsterdam, negarawan, hingga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda.

Bagi Kuyper, iman tidak boleh berhenti di ruang ibadah. Nilai-nilai keimanan harus hadir dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, media, ekonomi, hukum, politik, dan pemerintahan.

Gagasan itu kemudian dikenal dengan konsep "Sphere Sovereignty" atau kedaulatan bidang kehidupan. Sebuah pandangan bahwa setiap bidang kehidupan memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama.

Kuyper menunjukkan bahwa seorang pemimpin besar tidak lahir secara instan. Sebelum mencapai puncak kekuasaan, ia membangun kapasitas, gagasan, integritas, serta kepercayaan publik melalui perjalanan panjang dalam pelayanan gereja, dunia pendidikan, jurnalistik, dan perjuangan sosial.

Bagi Kuyper, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan konsekuensi dari pengabdian.

Membangun Kepemimpinan dari Tanah Batak

Semangat pemikiran Kuyper tersebut menjadi relevan bagi generasi muda Batak, termasuk putra-putri Sinaga yang memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa.

Kepemimpinan masa depan tidak dapat hanya bertumpu pada identitas marga atau garis keturunan. Seorang pemimpin harus ditempa melalui pendidikan, pengalaman, integritas, kemampuan mengelola pemerintahan, serta rekam jejak pengabdian kepada masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan daerah, jabatan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pengabdian tertinggi. Namun jabatan tersebut bukan simbol kejayaan kelompok tertentu, melainkan amanah untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

Lebih dari dua dekade sejak otonomi daerah berjalan, kawasan Danau Toba perlu melakukan evaluasi bersama. Berbagai pembangunan memang telah dilakukan, tetapi jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki, hasilnya masih belum sepenuhnya mampu menghadirkan perubahan ekonomi dan kesejahteraan yang merata.

Evaluasi tersebut bukan bentuk menyalahkan pemimpin sebelumnya, melainkan refleksi bahwa kawasan Danau Toba membutuhkan kepemimpinan yang lebih visioner, inovatif, dan mampu mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

Anugerah Supervulkan Toba yang Belum Sepenuhnya Diolah

Danau Toba merupakan salah satu warisan geologi terbesar dunia yang terbentuk akibat letusan Supervulkan Toba sekitar 75.000 tahun lalu.

Peristiwa tersebut meninggalkan anugerah luar biasa berupa tanah vulkanik yang subur, bentang alam yang mendunia, kekayaan budaya Batak, sumber daya air, potensi pertanian, perikanan, geowisata, penelitian, pendidikan, hingga ekonomi kreatif.

Dengan status sebagai kawasan geopark dunia, Danau Toba seharusnya mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Namun potensi besar tersebut tidak akan berkembang tanpa kepemimpinan yang mampu menerjemahkan kekayaan alam dan budaya menjadi kebijakan nyata.

Seorang kepala daerah tidak cukup hanya membangun jalan, gedung, dan fasilitas fisik. Pemimpin harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat UMKM, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta membuka ruang bagi generasi muda.

Anak Ni Raja, Na Pinaraja, dan Na Paraja-rajahan

Dalam filosofi Batak dikenal konsep tentang ukuran seorang pemimpin.

Anak Ni Raja menggambarkan seseorang yang memperoleh penghormatan karena garis keturunan. Dalam budaya Batak, asal-usul keluarga tetap menjadi bagian penting dari identitas sosial.

Namun dalam demokrasi modern, keturunan tidak cukup menjadi alasan seseorang memperoleh kepercayaan rakyat.

Ada konsep yang lebih tinggi, yakni Na Pinaraja. Istilah ini menggambarkan seseorang yang "dirajakan" oleh masyarakat karena kualitas dirinya: memiliki integritas, kemampuan, kebijaksanaan, pengalaman, dan karya nyata.

Pemimpin seperti inilah yang dihormati bukan karena siapa leluhurnya, tetapi karena apa yang telah diperbuat bagi masyarakat.

Sebaliknya, terdapat istilah Na Paraja-rajahan, yaitu mereka yang memperoleh kekuasaan melalui transaksi politik, kepentingan sesaat, politik uang, atau penyalahgunaan jabatan.

Model kepemimpinan seperti itu berpotensi menjauhkan pemerintahan dari hakikat pelayanan publik.

Kekuasaan Adalah Amanah

Jika pemikiran Abraham Kuyper dipertemukan dengan falsafah Batak, keduanya memiliki pesan yang sama: kepemimpinan adalah amanah moral.

Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Karena itu, siapa pun putra daerah yang bercita-cita menjadi kepala daerah di kawasan Danau Toba harus mempersiapkan diri sebagai "Na Pinaraja".

Jalan menuju kepemimpinan tidak boleh ditempuh melalui politik uang atau transaksi kepentingan, melainkan melalui pendidikan, pengalaman, kemampuan memahami persoalan rakyat, keberanian mengambil keputusan, dan rekam jejak pelayanan.

Apabila suatu saat lahir seorang Bupati dari kalangan Putra Sinaga, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari identitas marganya.

Ukuran sejatinya adalah apakah ia mampu menjadi "Na Pinaraja"—pemimpin yang dipercaya rakyat, menjaga integritas, mengelola anugerah Supervulkan Toba secara bijaksana, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Batak dan warga kawasan Danau Toba.

Pada akhirnya, warisan terbesar Abraham Kuyper bukan hanya teori politik dan keagamaan, tetapi pesan bahwa nilai iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Sebab kepemimpinan sejati bukan tentang seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada sesama. **(Red)**

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/Belitung Timur:** Yustami AI (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur **| Biro Tanjab Barat:** Kesuma Indrawijaya (Kepala) | **Biro Muko Muko:** Japri (Kepala), Aldo Surya Elwasa Putra | **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Biro Lampung Timur: -** | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As'adi (Kepala), Buaji **| Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) **| Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan: Wiro Utomo** (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Barat :** Suhardi | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

Investasi Puluhan Triliun di Setokok Jadi Sorotan, Dugaan Pelanggaran Aturan TKA Hingga Hak Pekerja Mencuat

\Batam, Jaya Pos

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan Setokok, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang memiliki nilai investasi mencapai Rp46–48 triliun, kini menjadi sorotan. Di balik besarnya investasi tersebut, muncul dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan, mulai dari keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga belum terpenuhinya hak dasar pekerja lokal atas jaminan sosial.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan Setokok, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. (Foto/A1)

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan dan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, terdapat dugaan bahwa sejumlah TKA yang bekerja dalam proyek tersebut tidak seluruhnya menempati jabatan yang mensyaratkan keahlian khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Informasi yang berkembang juga menyebutkan adanya pekerja asing yang diduga mengisi pekerjaan umum atau pekerjaan nonspesialis.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka kondisi itu berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa penggunaan TKA pada prinsipnya ditujukan untuk jabatan tertentu yang membutuhkan kompetensi atau keahlian khusus, serta harus memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.

Selain persoalan TKA, muncul pula dugaan bahwa sebagian tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek tersebut belum memperoleh perlindungan melalui program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, kepesertaan jaminan sosial merupakan hak pekerja sekaligus kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Salah seorang pekerja lokal inisial P yang tidak mau disebutkan namanya saat ditemui awak media mengaku belum memperoleh perlindungan jaminan sosial sejak bekerja di proyek tersebut.

Pernyataan tersebut masih berupa pengakuan narasumber dan belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak perusahaan. Pekerja tersebut juga mengaku melihat banyak TKA bekerja di berbagai bidang pekerjaan.

Pernyataan tersebut juga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Imigrasi.

Proyek Strategis Bernilai Puluhan Triliun

Proyek pembangkit listrik yang berada di kawasan Barelang tersebut merupakan salah satu proyek infrastruktur energi berskala besar. Berdasarkan berbagai sumber, proyek ini dirancang memiliki kapasitas sekitar 2 Gigawatt (GW) untuk PLTU dan 400 Megawatt (MW) untuk PLTS.

Pembangunan direncanakan berlangsung dalam dua tahap dengan estimasi investasi mencapai Rp46 hingga Rp48 triliun atau sekitar US$1,5 miliar. Proyek tersebut digagas oleh PT Batamindo Investment Cakrawala (BIC) yang merupakan anak perusahaan Gallant Venture Ltd.

Besarnya nilai investasi membuat proyek ini menjadi perhatian publik. Karena itu, aspek kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, penggunaan TKA, keselamatan kerja, hingga perlindungan hak-hak pekerja dinilai harus diawasi secara ketat agar manfaat investasi tidak mengabaikan kepentingan tenaga kerja Indonesia.

Akses Peliputan Dibatasi

Dalam upaya melakukan verifikasi, awak media mendatangi lokasi proyek pada Jumat (24/7/2026). Namun, petugas keamanan membatasi akses peliputan dan mengarahkan wartawan agar menyampaikan pertanyaan kepada pihak manajemen Batamindo di Muka Kuning maupun instansi terkait.

Selain membatasi akses, petugas juga melarang pengambilan gambar di sekitar pintu masuk proyek dan meminta dokumentasi yang sempat direkam untuk dihapus.

Pembatasan terhadap aktivitas jurnalistik di area luar proyek tersebut menjadi perhatian tersendiri, mengingat media memiliki fungsi melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki hak untuk menerapkan prosedur keamanan di kawasan operasionalnya. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara perusahaan dan media dinilai penting agar informasi yang beredar dapat diverifikasi secara objektif.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari PT Batamindo Investment Cakrawala, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kantor Imigrasi Batam, serta BPJS Ketenagakerjaan terkait dugaan penggunaan TKA, kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja lokal. **(A1)**

Bea Cukai Bali Nusra Musnahkan ..... *Halaman 7*

lanjut atas hasil penindakan sepanjang September 2025 hingga Juni 2026 yang dilakukan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra bersama Bea Cukai Ngurah Rai dan Bea Cukai Denpasar.

Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp11.242.663.248, dengan potensi kerugian penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp4.416.351.787.

Barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari 16.138 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 3.780.297 batang sigaret dan cerutu, 540 cartridge rokok elektrik (vape), 132 unit telepon seluler, laptop, dan tablet, 3.384 paket obat-obatan dan kosmetik, 2.110 paket pakaian, 410 paket alat kesehatan, serta 1.111 paket barang lainnya yang melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai.

Menurut Bea Cukai, pemusnahan merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum agar barang-barang ilegal tersebut tidak lagi memiliki peluang untuk beredar di tengah masyarakat.

Keberhasilan pengungkapan tersebut tidak lepas dari sinergi antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Kerja sama itu dinilai efektif dalam mencegah masuknya barang ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, mengganggu persaingan usaha yang sehat, serta mengurangi penerimaan negara.

Tak hanya di Bali, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang hasil penindakan di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Mataram, Sumbawa, Labuan Bajo, Kupang, dan Atambua.

Nilai barang yang telah maupun akan dimusnahkan di wilayah tersebut mencapai Rp15,26 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp9,65 miliar. Barang yang dimusnahkan meliputi 1.447 botol MMEA, 9.427.475 batang rokok, 123.273 gram tembakau iris, 21 bale pakaian bekas (balepressed), serta 3.207 paket berbagai barang pelintas batas dan barang lainnya.

Selama semester pertama 2026, Kanwil Bea Cukai Bali Nusra bersama seluruh kantor pelayanan di Bali, NTB, dan NTT telah melaksanakan 887 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk terhadap penyelundupan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). Total nilai barang hasil penindakan mencapai Rp109,6 miliar.

Selain penindakan, Bea Cukai juga telah menuntaskan dua perkara tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sementara melalui mekanisme ultimum remedium, Bea Cukai berhasil merealisasikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,36 miliar.

Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, Iyan Rubiyanto, menegaskan bahwa pemusnahan barang ilegal merupakan bentuk nyata akuntabilitas negara dalam penegakan hukum.

"Setiap barang ilegal yang berhasil kami amankan bukan hanya menyelamatkan potensi penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, keselamatan, serta dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berkeadilan," kata Iyan.

Ia menjelaskan, selain berperan sebagai pengumpul penerimaan negara (revenue collector), Bea Cukai juga menjalankan fungsi sebagai community protector, yakni melindungi masyarakat dari masuk dan beredarnya barang ilegal maupun berbahaya.

Di sisi lain, Bea Cukai juga berperan sebagai trade facilitator dan industrial assistance dengan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Bea Cukai mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberantas peredaran barang ilegal dengan mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

(Michael J Manurung)

62 Anak Penyandang Disabilitas..... *Halaman 7*

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menilai bantuan tersebut bukan sekadar alat bantu, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

"Kursi roda ini menjadi sarana agar anak-anak dapat bergerak, belajar, bermain, dan meraih masa depan dengan lebih mandiri," ujarnya.

Anton juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang terus mendampingi dan memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Ia menegaskan Pemkab Simalungun akan terus menghadirkan berbagai program yang mendukung penyandang disabilitas.

"Keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih cita-cita. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang," katanya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terus menyusun program yang ramah disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, berharap bantuan tersebut dapat membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk belajar, beraktivitas, dan bersosialisasi.

Ia juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan dukungan kepada anak-anak mereka karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Mewakili keluarga penerima manfaat, Erlina menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

"Bantuan ini sangat berarti bagi anak-anak kami. Semoga mereka semakin mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari," ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga sosial, dan mitra internasional, diharapkan semakin banyak anak penyandang disabilitas di Kabupaten Simalungun memperoleh akses terhadap layanan, fasilitas, dan pemenuhan hak secara setara.**(RD)**

Perumahan Nelayan Asri Deli Serdang Direvitalisasi ..... *Halaman 7*

Pemkab Deli Serdang merehabilitasi 10 unit rumah agar kembali layak huni. Selain itu, pemerintah juga membangun jalan lingkungan sepanjang 639,2 meter dan drainase sepanjang 387,1 meter.

Bupati Asri Ludin Tambunan mengatakan pembangunan kawasan akan dilanjutkan secara bertahap dengan menambah rumah di lahan yang masih tersedia. Hunian tersebut diprioritaskan bagi nelayan yang saat ini masih tinggal di bantaran sungai maupun pesisir.

"Rumah yang akan dibangun diperuntukkan bagi nelayan yang masih tinggal di bantaran sungai dan pinggir pantai. Masyarakat tidak dipungut biaya untuk menempatinya. Harapan kami, warga bisa tinggal di lingkungan yang lebih layak dan tidak lagi membangun rumah di kawasan pesisir," kata Asri.

Ia menegaskan, setelah seluruh rumah relokasi siap dihuni, bangunan warga yang masih berada di bantaran sungai dan kawasan pesisir akan ditertibkan sebagai bagian dari penataan wilayah.

"Kami ingin kawasan pesisir tetap terjaga sekaligus memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam dialog bersama warga, Bupati juga menerima usulan pembangunan sarana ibadah. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, bangunan MCK komunal yang sudah tidak digunakan akan dibongkar dan dialihfungsikan menjadi musala.

Selain merevitalisasi Perumahan Nelayan Asri, Pemkab Deli Serdang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan juga membangun dan merehabilitasi 21 rumah layak huni di sejumlah desa di Kecamatan Pantai Labu.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Bupati Kerja Bertemu Rakyat (Berjemur) yang turut menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pencetakan KTP, layanan pajak daerah (Lapak), hingga penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda empat kepada Brigade Pangan Mitra Tani dan UPJA Swadaya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan santunan Baznas yang bersumber dari zakat ASN kepada masyarakat desil rendah, kartu identitas bagi bilal mayit dan penggali kubur, serta bantuan sosial berupa kursi roda dan paket sembako dari Alumni SMANSA Kawan Aci (ASA).

Selain menyerahkan bantuan, Pemkab Deli Serdang juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari pemanfaatan lahan pertanian hingga persoalan yang dihadapi nelayan saat menjalankan aktivitas di laut. Seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah terkait sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada masyarakat, Bupati turut memberikan hadiah umrah kepada tiga bilal mayit dan penggali kubur.

(Ramdani)

Pergantian Kapolres Trenggalek..... *Halaman 7*

man serta kuatnya soliditas anggota menjadi kunci utama terutama dalam pengelolaan Kamtibmas.

"Saya berharap dukungan juga diberikan kepada Kapolres Trenggalek yang baru. Dengan semangat kebersamaan dan soliditas, yang telah terbangun baik, Polres Trenggalek akan semakin maju. Sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tandasnya

Senada, Kapolres Trenggalek yang baru AKBP Risky menambahkan jika pihaknya akan meneruskan berbagai kebijakan, program kerja maupun inovasi yang sudah dirintis. Agar terwujud kondusifitas berkelanjutan di Bumi Menak Sopal.

"Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh anggota sekalian. Apa yang telah ditinggalkan semuanya positif, akan kita lanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi," janji AKBP Rizky.

Dirinya juga berpesan kepada anggota sekalian agar senantiasa menjaga diri dan marwah kepolisian. Bertugas dengan tetap menerapkan azas proporsionalitas dan profesionalitas dalam bekerja.

"Dalam bertugas, pastikan untuk selalu menjaga diri dan marwah Polri dengan tetap proporsional serta profesional," tegasnya.

Sebagai puncak acara, sebelum meninggalkan kantor lamanya, AKBP Ridwan mengikuti tradisi pelepasan dengan prosesi payung pora. Seluruh anggota berjajar rapi untuk turut menghantarkan perwira menengah itu hingga pintu gerbang Mapolres Trenggalek.

(HWi)

Mulai 1 Agustus 2026, Jakarta Terapkan Sistem ..... *Halaman 7*

Jakarta mengoptimalkan 29 TPS 3R yang tersebar di berbagai wilayah. Saat ini, tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut baru mencapai sekitar 21 persen.

Salah satu fasilitas yang dioptimalkan adalah TPS 3R Menteng Atas. Fasilitas hasil kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Morego Green Indonesia dan PT Metro Klina Intranusa melalui skema creative financing ini memiliki kapasitas terpasang 25 ton sampah per hari dan berpotensi dikembangkan hingga 132 ton per hari.

"Di TPS 3R Menteng Atas ini kami menggandeng swasta melalui skema creative financing. Kapasitas pengolahan akan ditingkatkan secara bertahap dengan dukungan teknologi RDF mikro, tenaga profesional, dan manajemen yang optimal. Model kemitraan ini akan menjadi percontohan untuk mengoptimalkan TPS 3R lainnya di Jakarta," ujarnya.

Saat ini, TPS 3R Menteng Atas baru mengolah sekitar 6-8 ton sampah per hari sehingga masih memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas. Pemprov membuka peluang kerja sama bagi kawasan komersial, perkantoran, hotel, restoran, kafe, dan pelaku usaha lainnya agar menyalurkan sampah terpilah ke fasilitas tersebut.

Pramono juga mengungkapkan Pemprov DKI telah membebaskan lahan seluas 40 hektare di Ciaingir, Banten, untuk mendukung pengolahan sampah organik. Selain itu, pemerintah tengah membangun tiga unit PLTSa, termasuk di Sunter, yang ditargetkan mampu mengolah hingga 7.500 ton sampah per hari, serta mengembangkan fasilitas RDF di Rorotan dan Bantargebang.

Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan akan menindak tegas perusahaan jasa angkut sampah yang terbukti membuang sampah secara ilegal.

"Siapa pun pengelola swasta yang mengambil keuntungan dengan mengumpulkan sampah Horeka lalu membuang atau menimbunnya secara sembarangan tidak akan kami toleransi. Saya perintahkan jajaran untuk memproses hukum pengangkut sampah yang melanggar dan mengumumkannya secara terbuka kepada publik," tegasnya.

Sementara itu, Chairman PT Morego Green Indonesia, Wing Indrasmoro, menyatakan pihaknya siap mendukung transformasi pengelolaan sampah di Jakarta melalui investasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan standar operasional yang berkelanjutan.

"Kami siap mengoperasikan TPS 3R Menteng Atas secara optimal melalui investasi tambahan pada peralatan dan teknologi pengolahan sampah, penyediaan tenaga kerja yang kompeten, pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, serta penerapan sistem operasional sesuai standar industri. Kami berharap model kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan TPS 3R di wilayah lain," kata Wing.

Ke depan, sekitar 80 persen sampah yang diolah di TPS 3R Menteng Atas ditargetkan berasal dari kawasan komersial dan 20 persen dari permukiman. Dari total sampah yang masuk, sekitar 90 persen akan diolah menjadi kompos dan RDF yang berpotensi ditingkatkan menjadi Solid Recovered Fuel (SRF), sedangkan sekitar 10 persen sisanya berupa residu akan dikirim ke TPST Bantargebang.

(Jiston)

Dukung Pencegahan Stunting..... *Halaman 7*

kembang anak. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, bahan pangan asal hewan dapat mengalami penurunan mutu bahkan berpotensi membahayakan kesehatan.

"Melalui edukasi ini kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa protein hewani bukan hanya harus bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi. Cara memilih bahan yang segar dan teknik penyimpanan yang benar menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas MPASI sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting," tegas Anggriani.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum penyuluhan. Selanjutnya, mahasiswa menyampaikan materi mengenai pentingnya protein hewani bagi pertumbuhan anak, cara memilih bahan pangan asal hewan yang segar, teknik penyimpanan yang tepat, hingga diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Sebagai evaluasi, peserta kembali mengikuti post-test guna mengetahui peningkatan pemahaman setelah menerima materi edukasi.

Bidan Puskesmas Pembantu Kelurahan Rijang Pittu yang mendampingi kegiatan tersebut mengapresiasi inisiatif mahasiswa KKN Profesi Kesehatan Universitas Hasanuddin.

"Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya ibu hamil dan ibu yang memiliki baduta.

Kami berharap edukasi seperti ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan pangan asal hewan sama pentingnya dengan pemenuhan gizi dalam mendukung pencegahan stunting," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Profesi Kesehatan Angkatan 69 Universitas Hasanuddin berharap masyarakat dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyediaan MPASI yang aman, bergizi, dan berkualitas dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidenreng Rappang.**(Hk)**

Ulang Tahun Ke-59 Kesit B. Handoyo, Kebersamaan Warnai Markas PWI Jaya

Jakarta, Jaya Pos

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai perayaan ulang tahun ke-59 Ketua PWI Jaya Kesit B. Handoyo yang digelar di Markas PWI Jaya, Lantai 9 Gedung Bank Jakarta, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Acara sederhana namun penuh makna itu dihadiri jajaran pengurus PWI Jaya, para Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PWI dari lima wilayah, anggota PWI Jaya, serta sejumlah tamu undangan. Perayaan digagas oleh Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Jaya Rialini Nonnie Rering bersama Wakil Ketua Bidang Kerja Sama PWI Jaya Tb Adhi sebagai bentuk kebersamaan dan penghormatan kepada Kesit B. Handoyo yang genap berusia 59 tahun.

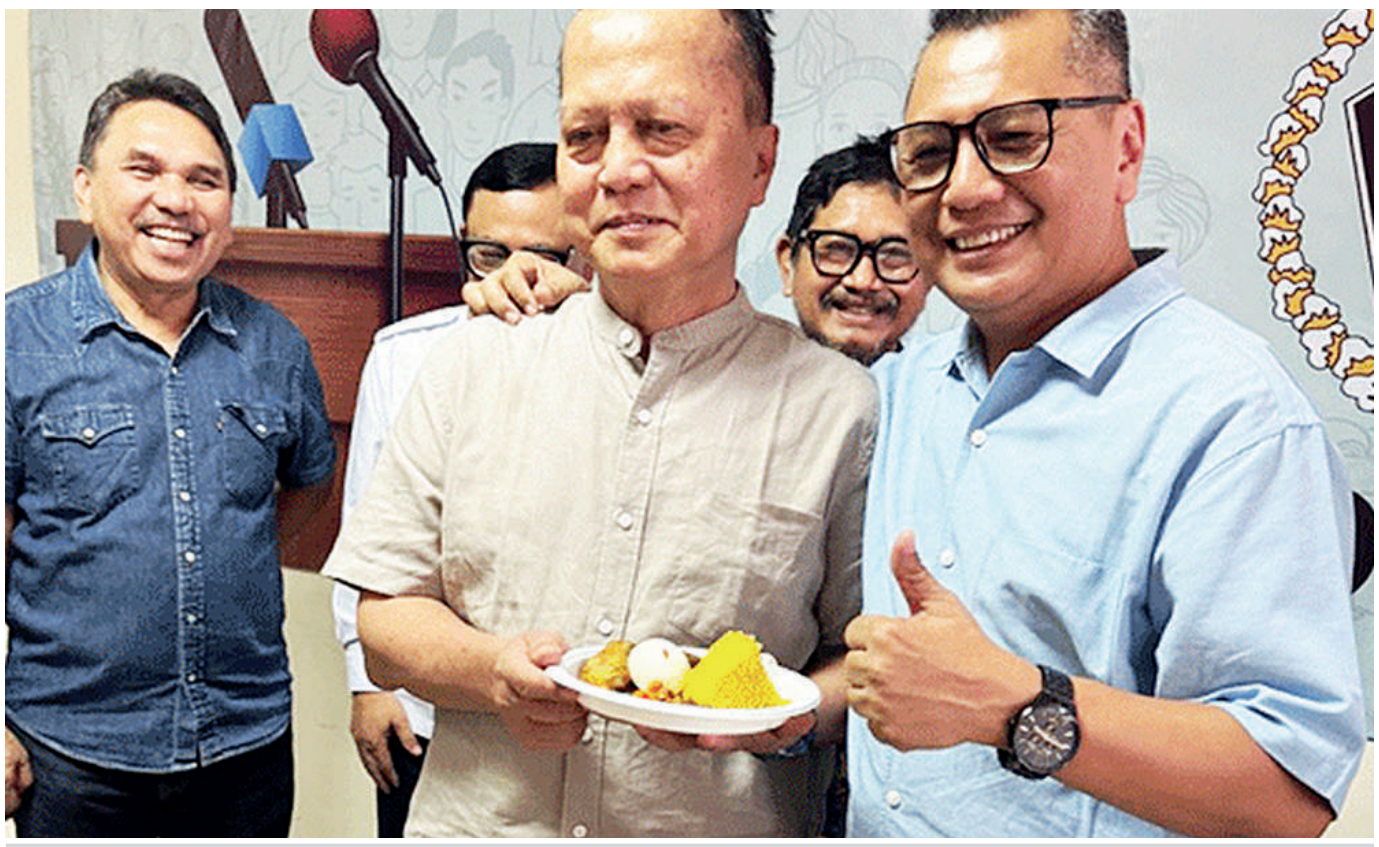

Tampak Wakil Ketua Bidang Kerja Sama PWI Jaya Tb Adhi sebagai bentuk kebersamaan dan penghormatan kepada Kesit B. Handoyo yang genap berusia 59. (Foto/A1)

Ucapan selamat juga mengalir melalui sejumlah karangan bunga yang memenuhi area Markas PWI Jaya. Di antaranya dikirim oleh Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) PWI Jaya Benny Joewono, Owner Playmaker Ophan Lamara, serta Ketua PSSI Jakarta Timur Salmon Siagian. Sementara itu, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) DKI Jakarta turut memberikan kue ulang tahun sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada Ketua PWI Jaya.

Rangkaian acara diawali dengan pemotongan tumpeng dan tiup lilin yang diiringi doa serta ucapan selamat dari para tamu. Suasana semakin meriah ketika para peserta bergantian menyumbangkan lagu dalam sesi karaoke yang berlangsung santai, diselingi canda dan cerita-cerita semasa bertugas sebagai wartawan.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Jaya Theo M. Yusuf menyampaikan doa agar Kesit B. Handoyo senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan kekuatan dalam memimpin PWI Jaya. Menurutnya, kepemimpinan yang mengedepankan kebersamaan menjadi modal penting untuk menjaga soliditas organisasi dan meningkatkan profesionalisme insan pers.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) PWI Jaya Adhi Wargono. Ia menilai momen ulang tahun tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan PWI Jaya. "Semoga Pak Kesit selalu sehat, sukses, dan terus membawa PWI Jaya semakin maju," ujarnya.

Perayaan itu juga menjadi ajang temu kangen dengan sejumlah sahabat lama Kesit B. Handoyo semasa aktif meliput di lapangan. Hadir di antaranya Boy Noya, Direktur Media I.League Eko Rahmawanto, penggagas Rembuk Sepak Bola Nasional (RSN) Eddy Syahputra, serta mantan Manajer Persebaya Ronny Tanuwijaya.

Penuh canda, tawa, dan cerita nostalgia, perayaan ulang tahun ke-59 Kesit B. Handoyo berlangsung dalam suasana akrab hingga selesai. Momen tersebut menjadi bukti eratnya tali persaudaraan di lingkungan PWI Jaya sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di antara para wartawan lintas generasi. **(A1)**

Kabupaten Maros Masuk Lima Daerah Tercepat Penginputan IETPD pada Capacity Building TP2DD di Surabaya

Tim IETPD Kabupaten Maros

Maros, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengikuti kegiatan Capacity Building dan Asistensi Penginputan Indeks Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Sheraton Hotel, Surabaya, pada 21–22 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi penerimaan daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Maros diwakili oleh Kepala Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Maros, Syamsuar, ST., MM, serta Kasubid Sistem Informasi Pajak Daerah Agus Ramdan, yang juga bertindak sebagai Person in Charge (PIC) TP2DD Kabupaten Maros.

Selama pelaksanaan capacity building, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber nasional dan daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bayu Martanto, memaparkan berbagai teknik dan strategi dalam pengisian Championship dan IETPD yang mengantarkan Jawa Timur meraih prestasi sebagai daerah terbaik.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rifki Ismal, memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan digitalisasi daerah dengan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.

Materi juga disampaikan oleh Alexcius Winang Bayu Seno dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ahmad Zainuddin dari Bapenda Provinsi Jawa Timur yang membagikan kisah sukses Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Tahun 2025, Surendro Nurbawono dari BPPD Kabupaten Sidoarjo, serta Aloysius Rendy Handoko dari Bank Jatim yang memaparkan inovasi layanan digital perbankan dalam mendukung transaksi pemerintah daerah.

Pada Selasa (22/7), rangkaian kegiatan dilanjutkan di Balai Kota Surabaya dengan materi dari Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Kota Surabaya mengenai implementasi digitalisasi penerimaan daerah. Peserta kemudian melakukan kunjungan edukatif ke De Javasche Bank Surabaya untuk melihat sejarah sistem keuangan dan perkembangan perbankan di Indonesia.

Masih pada hari yang sama, kegiatan dilanjutkan dengan asistensi dan penginputan IETPD Semester I Tahun 2026 di Sheraton Hotel Surabaya. Dalam sesi tersebut, Kabupaten Maros mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam lima Bapenda tercepat menyelesaikan penginputan IETPD sekaligus menjadi salah satu Bapenda yang paling aktif selama pelaksanaan kegiatan.

Keikutsertaan Kabupaten Maros dalam kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi penerimaan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, serta mendukung percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.**(Hk)**

Hari Anak Nasional 2026, Solok Selatan Perkuat Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Solok Selatan, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 dengan memperkuat komitmen dalam mewujudkan daerah yang ramah dan layak bagi anak

Peringatan HAN tahun ini mengusung tema "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan"" yang digelar di Aula Sarantau Sasurambi, Senin (27/7/2026). Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai bentuk kolaborasi dalam pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Bupati Solok Selatan H. Khairunas saat menyampaikan komitmen Pemkab dalam mewujudkan Kabupaten layak anak pada Peringatan Hari Anak Nasional ke 42 Tahun 2026 di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan Senin, 27 Juli 2026. (Foto/Hms)

Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, membacakan pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa anak merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan.

Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, hingga perundungan, baik di lingkungan sosial maupun ruang digital.

"Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan bukan hanya slogan, tetapi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, bahagia, dan terpenuhi hak-haknya," ujar Khairunas saat membacakan sambutan Menteri PPPA.

Menurutnya, keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan bangsa dalam melindungi serta mempersiapkan generasi penerus sejak dini.

Sementara itu, Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Solok Selatan, Ny. Erniati Khairunas, mengatakan anak-anak merupakan aset masa depan bangsa yang harus mendapatkan perhatian bersama.

Ia menegaskan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta ruang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Erniati juga mengapresiasi kerja sama antara DWP Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP&PA), serta Dinas Pendidikan dalam menyukseskan rangkaian kegiatan HAN 2026.

Peringatan Hari Anak Nasional di Solok Selatan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Melalui komitmen bersama tersebut, Pemkab Solok Selatan berharap upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dapat terus ditingkatkan demi melahirkan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. **(Y)**

BMPBB Apresiasi Gagalnya Penyelundupan 15 Ton Timah Ilegal, Desak APH Kejar Aktor Utama Mafia Tambang Babel

Pangkal Pinang, Jaya Pos

Barisan Muda Patriot Bangka Belitung (BMPBB) mengapresiasi keberhasilan aparat menggagalkan upaya penyelundupan hampir 15 ton timah ilegal di Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang. Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi mengusut hingga aktor intelektual dan jaringan mafia tambang yang diduga berada di balik kasus tersebut.

Ketua BMPBB, Deki Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Hukum (Satgas Tricakti) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam yang berhasil menggagalkan penyelundupan timah ilegal melalui KM Sewindu di Pelabuhan Pangkalbalam pada Selasa (29/7/2026).

Berdasarkan data yang diperoleh, petugas mengamankan 159 kampil bijih timah kering dengan berat sekitar 7.950 kilogram serta sekitar 7.000 kilogram balok timah yang dikemas dalam empat jumbo bag. Total barang bukti mencapai hampir 15 ton, dengan estimasi nilai mencapai sekitar Rp9,765 miliar.

Timah tersebut diduga akan dikirim menggunakan dua truk ekspedisi Bangka Jakarta Express (BJE). Modus yang digunakan disebut dengan menyamarkan pasir timah di antara kardus pres dan plastik rongsokan serta menggunakan dokumen pengiriman (delivery order/DO) barang bekas dari kawasan Pelabuhan Pangkalbalam.

Dalam keterangannya kepada JAPOS.CO, Jumat (31/7/2026), Deki meminta aparat penegak hukum, termasuk Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran TNI dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya, mengusut tuntas dugaan jaringan mafia timah ilegal yang beroperasi di daerah tersebut.

Ketua DPP BMPBB Deki Kurniawan Apresiasi APH Gagalkan Penyelundupan 15 Ton Timah Ilegal. (Foto/Yustami)

"Kami memberikan apresiasi atas langkah tegas TNI, Polri, dan KSOP dalam menggagalkan penyelundupan ini. Namun penegakan hukum harus menyentuh seluruh jaringan pelaku, bukan hanya pelaksana di lapangan," ujar Deki.

BMPBB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum.

Pertama, mendukung penuh kinerja Satgas Tricakti dan KSOP Pangkalbalam sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga sumber daya alam timah di Bangka Belitung.

Kedua, meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung mengusut kasus hingga ke pemilik barang, bandar, dan pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi timah ilegal.

Ketiga, BMPBB meminta manajemen perusahaan ekspedisi Bangka Jakarta Express (BJE) diperiksa apabila ditemukan dugaan kelalaian maupun keterlibatan dalam proses pengiriman barang ilegal. Pernyataan tersebut merupakan desakan organisasi dan belum merupakan kesimpulan hukum.

Keempat, BMPBB mendorong penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan unsur pidana, sehingga aset hasil kejahatan dapat disita untuk negara.

Kelima, organisasi tersebut meminta KSOP dan pengelola pelabuhan memperketat sistem pengawasan terhadap manifest, surat jalan, dan pemeriksaan fisik barang agar modus serupa tidak kembali terjadi.

Menurut Deki, modus penyelundupan timah dengan menyamarkannya sebagai barang rongsokan bukanlah hal baru di Pelabuhan Pangkalbalam.

"Kalau pengusutan hanya berhenti pada sopir atau kurir, maka jaringan di belakangnya akan tetap berjalan. Kami berharap aparat mengungkap siapa pemilik barang dan pihak yang mengendalikan praktik ini," katanya.

Ia menilai kekayaan timah Bangka Belitung seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bukan dinikmati oleh kelompok yang melakukan aktivitas pertambangan dan perdagangan ilegal.

Deki juga meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung mengawal proses penanganan perkara tersebut secara profesional dan transparan hingga tuntas.

BMPBB menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut serta membuka posko pengaduan masyarakat terkait dugaan aktivitas pertambangan dan perdagangan timah ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. **(Yustami)**